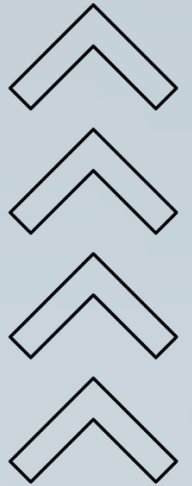




**PEMERINTAH**  
Kabupaten Pandeglang



**2026**

# **RENCANA KERJA**

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah  
Kabupaten Pandeglang



## KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Pandeglang dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026. Dokumen ini disusun sebagai bagian dari tahapan perencanaan tahunan perangkat daerah, guna menyesuaikan dinamika pelaksanaan program, kegiatan, dan hasil evaluasi kinerja hingga Triwulan IV Tahun Anggaran 2025.

Renja BPKD Kabupaten Pandeglang Tahun 2026 ini merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pandeglang Tahun 2026, yang disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, serta mengacu pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, termasuk hasil pemutakhiran melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023.

Penyusunan Renja BPKD 2026 ini dilaksanakan untuk memastikan keselarasan antara kebijakan strategis daerah dengan kemampuan keuangan serta kebutuhan riil pelaksanaan tugas Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, sehingga tujuan dan sasaran pembangunan dapat tercapai secara efektif, efisien, dan akuntabel. Dokumen ini menjadi pedoman penting bagi BPKD Kabupaten Pandeglang dalam pelaksanaan program dan kegiatan pengelolaan keuangan serta aset daerah selama Tahun Anggaran 2026.

Pada kesempatan ini, kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, masukan, dan kerja sama selama proses penyusunan dokumen ini, baik dari perangkat daerah terkait, para pemangku kepentingan, maupun seluruh jajaran internal Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pandeglang.





Semoga Renja BPKD Kabupaten Pandeglang Tahun 2026 ini dapat menjadi acuan dalam mewujudkan tata kelola keuangan Daerah yang transparan, profesional, dan berintegritas demi mendukung keberhasilan pembangunan Kabupaten Pandeglang.

Pandeglang, November 2025

**KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN  
DAERAH  
KABUPATEN PANDEGLANG**

  
**YAHYA GUNAWAN KASBIN. S.Sos**

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19671127 198801 1 001





## DAFTAR ISI

<b>i</b>	<b>KATA PENGANTAR</b>
<b>iii</b>	<b>DAFTAR ISI</b>
<b>iv</b>	<b>DAFTAR TABEL</b>
<b>1</b>	<b>BAB I PENDAHULUAN</b>
<b>2</b>	I.1 Latar Belakang
<b>3</b>	I.2 Dasar Hukum
<b>5</b>	I.3 Maksud dan Tujuan
<b>6</b>	I.4 Sistematika Penulisan
<b>8</b>	<b>BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025</b>
<b>9</b>	II.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
<b>11</b>	II.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
<b>20</b>	II.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah
<b>28</b>	II.4 Reviu Terhadap RKPD
<b>32</b>	II.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan
<b>33</b>	<b>BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH</b>
<b>34</b>	III.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
<b>45</b>	III.2 Tujuan dan Sasaran Renja BPKD Kabupaten Pandeglang
	III.3 Program dan Kegiatan
<b>57</b>	<b>BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH</b>
	<b>BAB V PENUTUP</b>





## DAFTAR TABEL

- 9 Tabel II.1 Jumlah Kegiatan pada Renja BPKD Tahun 2025 Berdasarkan Sasaran dan Program
- 10 Tabel II.2 Capaian kinerja program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota berdasarkan indikator sasaran
- 11 Tabel II.3 Capaian kinerja berdasarkan program pengelolaan keuangan daerah berdasarkan indikator sasaran
- 13 Tabel II.4 Capaian kinerja berdasarkan program pengelolaan keuangan daerah berdasarkan indikator sasaran
- 17 Tabel III.1 Rincian Pendanaan Belanja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan TA 2025
- 22 Tabel III.2 Rencana Kerja Perubahan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2025





# BABI

## PENDAHULUAN





## 1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2026 merupakan pelaksanaan tahun pertama dari Rencana Strategis BPKD Kabupaten Pandeglang Tahun 2025–2029. Renja BPKD merupakan dokumen perencanaan tahunan yang memuat arah kebijakan, program, kegiatan, indikator kinerja, dan pendanaan yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah dalam satu tahun anggaran.

Penyusunan Renja BPKD Kabupaten Pandeglang mengacu pada Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Secara teknis, penyusunan Renja juga berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Renja BPKD disusun dengan mengacu pada dokumen RKPD Kabupaten Pandeglang Tahun 2026, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun sebelumnya, permasalahan yang dihadapi, serta usulan program dan kegiatan strategis sesuai tugas dan fungsi BPKD. Renja ini memuat program dan kegiatan yang sedang berjalan, kegiatan baru, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan prakiraan maju sebagai bagian integral dari penyusunan RKPD.

Sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, proses penyusunan Renja BPKD Kabupaten Pandeglang dilaksanakan melalui tahapan berikut:





1. Penyiapan penyusunan Renja, meliputi pembentukan tim penyusun, orientasi penyusunan Renja, penyusunan agenda kerja, serta penyiapan data dan informasi perencanaan.
2. Penyusunan draft Renja, yang berpedoman pada arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah sebagaimana tercantum dalam RKPD.
3. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah, yaitu pembahasan Renja BPKD bersama para pemangku kepentingan untuk memperoleh masukan dan menyepakati prioritas kegiatan pembangunan.
4. Penetapan Renja BPKD, sebagai dasar penyusunan RKA–SKPD dan pelaksanaan program serta kegiatan tahun 2026.

## 1.2. Landasan Hukum

Dalam penyusunan akhir Rencana Kerja Perubahan rBadan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pandeglang ini, peraturan-peraturan yang digunakan sebagai landasan hukum antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 116 Tahun 2024 tentang Kabupaten Pandeglang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 302, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7053);
2. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Barang Milik Daerah;
3. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tangung Jawab Keuangan Negara;
6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;





8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Bupati Pandeglang No. 55 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2025 No. 56);
14. Peraturan Bupati Pandeglang No. 60 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2025 No. 61);
15. Peraturan Bupati Pandeglang No 120 tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah.





### 1.3. Maksud dan Tujuan

#### 1.3.1. Maksud

Renja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2026 adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun dengan maksud untuk memberikan arah dan acuan dalam penentuan program dan kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2026 dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pandeglang secara berkesinambungan sebagai berikut:

#### 1.3.2. Tujuan

Penyusunan Renja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2026 bertujuan :

1. Menetapkan secara spesifik prioritas pembangunan yang paling mendesak dan harus segera dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2026. Serta menyusun rencana kerja secara terperinci yang memuat mulai dari penjabaran program dan kegiatan prioritas, lengkap dengan indikasi pagu anggaran (prakiraan kebutuhan dana) yang dibutuhkan untuk pelaksanaannya pada Tahun 2026.
2. Menjadi pedoman utama untuk pelaksanaan kegiatan operasional sepanjang Tahun Anggaran 2026.
3. Menyediakan dokumen rumusan rencana program, kegiatan, sub kegiatan serta indikator kinerja, kelompok sasaran, pendanaan indikatif, dan lokasi kegiatan dalam bentuk dokumen perencanaan tahunan BPKD tahun 2026;
4. Menyediakan sarana pengendalian program dan kegiatan tahun 2026 dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran strategis Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pandeglang secara sistematis dan terorganisir;
5. Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2026 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;





6. Menjadi dasar utama dalam proses penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2026.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan Renja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pandeglang Kabupaten Pandeglang Tahun 2026 mengacu kepada peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

##### **BAB I. PENDAHULUAN**

Merupakan pendahuluan yang berisi gambaran umum penyusunan Akhir Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik, penjelasan landasan hukum tentang undang-undang, peraturan pemerintah peraturan daerah dan ketentuan peraturan lainnya, serta maksud dan tujuan dari penyusunan Renja OPD.

##### **BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025**

Menguraikan tentang evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024, analisis kinerja, isu-siu penting, review serta penelaahan usulan program dan kegiatan.e

##### **BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

Dalam penyusunan Renja ini menyajikan tentang tujuan dan sasaran OPD dan telaahan terhadap kebijakan nasional.

##### **BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Menguraikan rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah yang dibutuhkan pada Tahun 2025.





## **BAB V. PENUTUP**

adalah bagian akhir, yang berisi bab penutup dari penulisan Rencana Kerja ini.

## **LAMPIRAN**





# BAB II

HASIL EVALUASI RENJA  
PERANGKAT DAERAH  
TAHUN 2025





## II.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Kegiatan review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya serta pencapaian kinerja Renstra BPKD Kabupaten Pandeglang dilakukan untuk mengetahui tingkat kemampuan perangkat daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Evaluasi ini bertujuan mengidentifikasi capaian target kinerja, tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan, serta hambatan dan tantangan yang memengaruhi pencapaian kinerja.

Evaluasi didasarkan pada beberapa sumber informasi, yaitu:

1. Laporan hasil evaluasi pelaksanaan Renja BPKD tahun-tahun sebelumnya.
2. Laporan evaluasi pelaksanaan Renstra BPKD Kabupaten Pandeglang.
3. Perkiraan pelaksanaan DPA BPKD tahun berjalan yang telah disahkan.

Telaahan hasil evaluasi meliputi aspek-aspek berikut:

1. Realisasi program dan kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
2. Realisasi program dan kegiatan yang memenuhi target kinerja sesuai rencana.
3. Realisasi program dan kegiatan yang melampaui target kinerja yang telah ditetapkan.
4. Faktor-faktor penyebab tercapainya, tidak tercapainya, atau terlampauinya target kinerja program dan kegiatan.

Faktor-faktor tersebut menjadi pertimbangan penting dalam merumuskan kebutuhan program dan kegiatan pada Renja tahun berikutnya, terutama dalam menentukan prioritas, strategi pelaksanaan, serta penyesuaian kebijakan perencanaan dan penganggaran.





Selanjutnya, review terhadap capaian prioritas dan target kinerja program Renstra dilakukan melalui langkah-langkah berikut:

1. Mengidentifikasi sasaran pembangunan, prioritas program, dan target kinerja program sesuai Renstra;
2. Mengevaluasi capaian prioritas program berdasarkan hasil evaluasi Renstra tahun-tahun sebelumnya untuk mengetahui tingkat kemajuan menuju target akhir Renstra;
3. Mengidentifikasi potensi permasalahan pembangunan daerah yang berkaitan dengan pencapaian kinerja program dan kontribusinya terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah;
4. Merumuskan kebijakan atau langkah strategis yang diperlukan pada tahun rencana, termasuk program atau kegiatan yang perlu diprioritaskan dan strategi optimalisasi pencapaian target kinerja.

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, dilakukan analisis mendalam mengenai pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang transparan mengenai faktor pendorong dan penghambat keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan. Analisis ini menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan perencanaan dan penganggaran BPKD pada tahun berikutnya.

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja dan pencapaian Renstra BPKD Kabupaten Pandeglang Tahun 2025 disajikan dalam Tabel 2.1.

Tabel II.1

Capaian Kinerja BPKD s.d. Triwulan III Tahun 2025

No	Indikator	Satuan	2025		2026		2027		2028		2029		2030		Ket
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
1	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	Nilai	75,7	-	79,7	-	81,7	-	83,7	-	85,7	-	87,7	-	
2	Opini BPK-RI Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Predikat	WTP	WTP	WTP	-	WTP	-	WTP	-	WTP	-	WTP	-	
3	Nilai AKIP BPKD	Nilai	75	-	76	-	77	-	79	-	80	-	81	-	
4	Persentase Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Persentase	73.49%	65%	80%	-	82%	-	84%	-	86%	-	88%	-	
5	Persentase laporan keuangan SKPD sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan dan tepat waktu;	Persentase	100%	75%	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	
6	Persentase progres penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil BPK-RI;	Persentase	84,8%	62.84%	85%	-	85,3%	-	85,7%	-	86%	-	86,5%	-	
7	Persentase Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah Sesuai Standar	Persentase	100%	75%	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	
8	Persentase Data dan Implementasi Sistem Informasi Keuangan Daerah Sesuai Standar	Persentase	100%	75%	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	
9	Indeks Kapasitas Fiskal Daerah	Indeks	0,82	-	0,84	-	0,86	-	0,88	-	0,907	-	0,91	-	
10	Persentase Jumlah Perda dan Perbup RAPBD dan RAPBD-P tepat waktu;	Persentase	100%	100%	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	





11	Persentase penyusunan kebijakan pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah;	Persentase	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		
12	Persentase SKPD menyampaikan laporan Barang Milik Daerah sesuai peraturan perundang undangan dan tepat waktu;	Persentase	100%	75%	100%		100%		100%		100%		100%		
13	Jumlah tanah milik daerah yang didaftarkan untuk penerbitan sertifikat	Nilai	125	205	219		296		281		250		220		
14	Persentase barang milik daerah yang dimanfaatkan	Persentase	19,10%	n/a	20,22%		21,34%		22,47%		22,59%		23%		

Sumber : Capaian Kinerja BPKD Kab. Pandeglang Triwulan III

## II.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pembahasan kinerja pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pandeglang menjadi sangat krusial karena menjadi dasar dalam merumuskan tujuan, sasaran, dan strategi BPKD kedepannya. Evaluasi kinerja layanan membantu menentukan kekuatan atau kelemahan pelaksanaan peran suatu perangkat daerah selama lima tahun terakhir. Hal ini juga dapat dijadikan sebagai tolak ukur untuk memperbaiki mutu layanan perencanaan agar lebih responsif, berbasis data, dan selaras dengan kebutuhan pembangunan daerah yang terus berkembang.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara capaian target pada indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja dengan realisasi capaian kinerja masing-masing indikator sesuai dengan perjanjian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pandeglang, sebagai berikut:

- 1) Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)
- 2) Opini BPK atas audit laporan Keuangan Pemerintah Daerah
- 3) Persentase Realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
- 4) Nilai Akip Perangkat Daerah

Tingkat capaian kegiatan untuk setiap indikator kinerja utama dan indikator kinerja kunci yang dilaksanakan melalui program, kegiatan dan Sub Kegiatan secara umum telah tercapai dengan sangat baik, pencapaian sasaran yang diperoleh oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pandeglang tahun 2025 sampai dengan triwulan III adalah





A. Indikator yang telah mencapai target.

Realisasi kinerja pada indikator Persentase Jumlah Perda dan Perbup RAPBD dan RAPBD-P tepat waktu, Persentase penyusunan kebijakan pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah, Opini BPK-RI Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah menunjukkan hasil yang telah memenuhi target yang telah ditetapkan pada tahun sebelumnya. Capaian ini mencerminkan konsistensi pelaksanaan program serta efektivitas strategi yang telah diimplementasikan oleh Perangkat Daerah.

Hasil capaian kinerja tersebut didukung oleh optimalisasi sumber daya, koordinasi lintas unit kerja, serta mekanisme monitoring yang berjalan baik sehingga seluruh tahapan Program, kegiatan, dan sub kegiatan dapat terlaksana sesuai target kinerja yang sudah ditetapkan. Dengan tercapainya target ini, maka capaian kinerja yang sudah ditetapkan didalam indikator kinerja utama (IKU) dan indikator kinerja kunci (IKK) dinilai sudah sesuai harapan dan menjadi dasar penguatan keberlanjutan program pada tahun berikutnya.

B. Indikator dengan Realisasi Hampir Mencapai Target.

Pada indikator Persentase Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Persentase laporan keuangan SKPD sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan dan tepat waktu, Persentase progres penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil BPK-RI, Persentase Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah Sesuai Standar Persentase Data dan Implementasi Sistem Informasi Keuangan Daerah Sesuai Standar. Tingkat realisasi menunjukkan capaian yang mendekati target dengan persentase selisih sebesar 8%-25% dari nilai yang telah ditetapkan. Meskipun belum sepenuhnya memenuhi target, hasil tersebut tetap menunjukkan tren kinerja positif dan sudah berjalan sesuai rencana dalam kategori kinerja yang baik.





Beberapa faktor yang menyebabkan belum tercapainya target secara penuh antara lain dikarenakan kendala teknis di lapangan, serta penyesuaian kebijakan pengelolaan keuangan daerah yang terjadi pada pertengahan tahun anggaran. Upaya perbaikan dan percepatan realisasi target telah dilakukan melalui percepatan pelaksanaan kegiatan pada triwulan akhir tahun berjalan.

Walaupun demikian, capaian ini tetap memberikan gambaran bahwa pelaksanaan program sudah berada pada koridor yang tepat dan memerlukan peningkatan efisiensi serta penguatan koordinasi untuk penyempurnaan pada tahun mendatang.

#### C. Indikator dengan Realisasi yang Baru Akan Diperoleh Tahun Depan

Untuk indikator Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah, Nilai AKIP BPKD, Indeks kapasitas fiskal daerah. Data realisasi belum dapat disajikan pada tahun pelaporan karena proses pengumpulan, verifikasi, atau publikasi data dari instansi terkait baru akan tersedia pada tahun anggaran berikutnya.

Indikator diatas merupakan jenis indikator yang tergantung pada siklus evaluasi eksternal, ketersediaan data statistik periodik, atau penyelesaian proses audit/rekonsiliasi yang baru dirilis pada awal tahun berikutnya. Oleh karena itu, realisasi sementara pada tahun berjalan masih dicatat sebagai belum tersedia (data pending). Perangkat Daerah tetap melakukan pemantauan terhadap progres kegiatan sepanjang tahun, namun nilai final capaian kinerja hanya akan ditetapkan setelah data resmi diterbitkan oleh Instansi yang berwenang. Hasil data tersebut nantinya menjadi dasar evaluasi pencapaian sasaran dan penyesuaian program pada perencanaan tahun selanjutnya.





Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya BPKD Kabupaten Pandeglang terdiri dari :

- 1) Sekretariat Badan, terdiri atas:
  - a) Sub Bagian Tata Usaha
- 2) Bidang Anggaran
  - a) Sub Bagian Kebijakan Anggaran
  - b) Sub Bagian Penyusunan Anggaran
- 3) Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah
  - a) Sub Bagian Perbendaharaan
  - b) Sub Bagian Dana Transfer dan Kas Daerah
- 4) Bidang Akuntansi
  - a) Sub Bagian Akuntansi Keuangan Daerah
  - b) Sub Bagian Pelaporan Keuangan Daerah
- 5) Bidang Barang Milik Daerah
  - a) Sub Bagian Pemberdayaan BMD
  - b) Sub Bagian Penatausahaan BMD
- 6) Jabatan Fungsional
- 7) Jabatan Pelaksana

#### A) Indikator Kinerja Utama

Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Pandeglang merupakan instrumen strategis dalam mengukur capaian tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025–2030. Indikator ini disusun secara terukur, relevan, dan selaras dengan arah kebijakan pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pandeglang, serta memperhatikan prinsip *SMART* (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound).

Dalam konteks sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP), indikator ini juga menjadi tolak ukur kinerja utama BPKD dalam mendukung pencapaian *outcome* pembangunan daerah khususnya pada





aspek pengelolaan keuangan daerah yang transparan, efisien, dan akuntabel. Penyusunan indikator mengacu pada Permenpan RB Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Instansi Pemerintah, serta Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah.

Adapun indikator kinerja utama yang ditetapkan untuk Rencana Kerja 2026 adalah sebagai berikut:

1. Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Indikator ini menggambarkan tingkat kinerja pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri. Peningkatan nilai IPKD mencerminkan perbaikan tata kelola keuangan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban keuangan daerah. Target IPKD yang meningkat dari 77,7 pada tahun 2025 menjadi 79,7 pada tahun 2026 menunjukkan komitmen BPKD dalam memperkuat prinsip *good governance* dan *value for money* dalam pengelolaan keuangan daerah. Dasar hukum utama indikator ini adalah Permendagri Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran dan Penilaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui IPKD.
2. Opini BPK-RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI merupakan ukuran objektif atas tingkat kewajaran penyajian laporan keuangan pemerintah daerah. Pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) secara konsisten selama periode 2025–2030 menjadi wujud keberhasilan BPKD dalam mengimplementasikan standar akuntansi pemerintahan dan menjaga transparansi serta akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Dasar hukum indikator ini adalah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara serta Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
3. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) BPKD Nilai AKIP merupakan hasil evaluasi atas penerapan sistem manajemen





kinerja di lingkungan BPKD, yang mencakup perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan pemanfaatan data kinerja untuk peningkatan tata kelola. Target peningkatan nilai AKIP dari 75 pada tahun 2025 menjadi 76 pada tahun 2026 menunjukkan upaya berkelanjutan untuk memperkuat integrasi perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja, serta efektivitas pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan BPKD. Landasan hukum indikator ini antara lain Permenpan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

4. Persentase Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Indikator ini mengukur tingkat efektivitas BPKD dalam mengelola sumber-sumber PAD sesuai target yang ditetapkan dalam APBD. Target peningkatan realisasi PAD dari 73,49% di tahun 2025 menjadi 80% pada tahun 2026. Peningkatan persentase realisasi PAD menunjukkan keberhasilan dalam optimalisasi pendapatan daerah, perbaikan sistem penagihan, serta penguatan kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan.

#### B) Indikator Kinerja Kunci

Dalam rangka mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, efektif, dan efisien, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Pandeglang menetapkan sejumlah indikator kinerja kunci (IKK) yang menjadi ukuran keberhasilan pencapaian sasaran strategis selama periode Rencana Strategis Tahun 2025–2030. Indikator-indikator tersebut mencerminkan upaya BPKD dalam memperkuat sistem pengelolaan keuangan daerah, peningkatan kapasitas fiskal, penertiban aset, serta penyempurnaan kebijakan teknis yang mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah yang akuntabel dan berorientasi hasil (*result-based management*).

1. Persentase laporan keuangan SKPD sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan dan tepat waktu;

Indikator ini mengukur tingkat kepatuhan seluruh SKPD dalam penyusunan dan penyampaian laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan ketepatan waktu yang





ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Capaian 100% setiap tahun menunjukkan bahwa tata kelola pelaporan keuangan daerah telah berjalan optimal dan selaras dengan prinsip akuntabilitas keuangan publik sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

2. Persentase progres penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil BPK-RI;

Indikator ini menggambarkan sejauh mana pemerintah daerah melalui BPKD mampu menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI). Peningkatan persentase tindak lanjut dari 84,8% pada tahun 2025 menjadi 85% pada tahun 2025 menunjukkan adanya perbaikan berkelanjutan (*continuous improvement*) dalam pengelolaan keuangan, serta komitmen untuk memperkuat integritas dan transparansi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

3. Persentase koordinasi dan pengelolaan perbendaharaan daerah sesuai standar;

Indikator ini menilai efektivitas koordinasi dan penerapan standar pengelolaan perbendaharaan daerah dalam proses penyaluran, pencatatan, dan pertanggungjawaban keuangan daerah. Capaian 100% menandakan seluruh kegiatan perbendaharaan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menjadi pedoman utama pelaksanaan APBD.

4. Persentase data dan implementasi sistem informasi keuangan daerah sesuai standar;

Indikator ini menggambarkan tingkat keterpaduan dan kesesuaian sistem informasi keuangan daerah dengan regulasi dan kebutuhan manajerial pemerintah daerah. Pemanfaatan sistem informasi yang andal





seperti SIPD-RI dan E-Sipkd menjadi kunci dalam mewujudkan efisiensi dan akurasi pelaporan keuangan daerah

5. Indeks kapasitas fiskal daerah;

Indikator ini mencerminkan kemampuan keuangan daerah dalam membiayai pelaksanaan urusan pemerintahan dan pembangunan daerah. Peningkatan indeks dari 0,82 menjadi 0,91 menunjukkan adanya perbaikan kemandirian fiskal, optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD), serta peningkatan kualitas belanja daerah yang produktif. Pengukuran ini sejalan dengan pedoman Kementerian Keuangan RI tentang penghitungan kapasitas fiskal daerah.

6. Persentase jumlah Perda dan Perbup RAPBD dan RAPBD-P tepat waktu

Indikator ini mengukur ketepatan waktu penyusunan dan penetapan dokumen peraturan daerah dan peraturan bupati terkait Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) serta perubahan RAPBD. Capaian 100% menunjukkan efektivitas koordinasi antara eksekutif dan legislatif dalam proses penganggaran daerah, sesuai dengan ketentuan Permendagri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan APBD.

7. Persentase penyusunan kebijakan pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah;

Indikator ini menilai kemampuan BPKD dalam menyiapkan kebijakan dan pedoman teknis sebagai turunan dari regulasi nasional agar implementasi pengelolaan keuangan daerah di tingkat SKPD berjalan seragam dan akuntabel. Capaian 100% setiap tahun menunjukkan fungsi regulatif dan pembinaan keuangan daerah telah terlaksana dengan baik.

8. Persentase SKPD menyampaikan laporan Barang Milik Daerah sesuai peraturan perundang-undangan dan tepat waktu;

Indikator ini menilai kepatuhan SKPD dalam menyampaikan laporan Barang Milik Daerah (BMD) kepada BPKD. Konsistensi capaian 100% menunjukkan tertib administrasi aset dan penguatan penatausahaan BMD sesuai dengan Permendagri Nomor 47





Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah.

9. Jumlah tanah milik daerah yang didaftarkan untuk penerbitan sertifikat:

Indikator jumlah tanah milik daerah yang didaftarkan untuk penerbitan sertifikat menggambarkan tingkat kemajuan pemerintah daerah dalam upaya penertiban dan legalisasi aset berupa tanah yang dimiliki pemerintah. Upaya ini penting dilakukan untuk menjamin kepastian hukum atas kepemilikan aset daerah serta mencegah potensi sengketa atau pengalihan aset yang tidak sah.

Indikator ini menggambarkan sejauh mana tanah milik daerah telah didaftarkan untuk penerbitan sertifikat menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun. Target pada tahun 2025 sebesar 125 sertifikat. Serta realisasi yang telah diusulkan sebanyak 205 tanah milik daerah pada tahun 2025. Peningkatan ini mencerminkan adanya komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat pengelolaan aset melalui percepatan proses sertifikasi tanah.

10. Persentase Barang Milik Daerah yang dimanfaatkan.

Indikator persentase barang milik daerah dapat dimanfaatkan, secara optimal untuk mendukung pelayanan publik dan peningkatan pendapatan daerah. Peningkatan jumlah pemanfaatan barang milik daerah Pada awal periode pengamatan, Berdasarkan data proyeksi kinerja 2025-2030, capaian indikator tercatat sebesar 19,10%, kemudian meningkat menjadi 20,22%, 21,34%, 22,47%, dan 22,59%, hingga mencapai 23% pada tahun terakhir. mencerminkan peningkatan nilai ekonomi dan produktivitas aset daerah, sebagaimana diamanatkan dalam PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

Kenaikan capaian indikator tersebut menunjukkan bahwa kebijakan dan program pengelolaan barang milik daerah, khususnya dalam bidang administrasi aset, telah berjalan dengan efektif. Meskipun demikian, masih terdapat ruang untuk perbaikan, terutama dalam percepatan inventarisasi, verifikasi, dan pengajuan sertifikasi tanah yang belum





terdaftar, agar seluruh aset daerah dapat terjamin legalitasnya secara menyeluruh.

### **II.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah**

Berdasarkan analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah, kajian hasil evaluasi pelaksanaan Perangkat Daerah, serta kajian terhadap pencapaian kinerja Renstra Perangkat Daerah, maka dapat dirumuskan isu-isu penting yang terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Sebagai perangkat daerah yang mengemban mandat strategis dalam urusan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah, efektivitas Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pandeglang didalam melaksanakan kinerjanya menjadi tolak ukur utama akuntabilitas dan transparansi pemerintah daerah. Untuk memastikan BPKD Kabupaten Pandeglang mampu menjalankan fungsinya secara optimal, identifikasi isu-isu strategis menjadi fondasi dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra).

Isu-isu strategis ini merepresentasikan tantangan fundamental serta peluang signifikan yang akan membentuk arah kebijakan tata kelola keuangan dan barang milik daerah ke depan. Proses identifikasi melibatkan analisis secara mendalam terhadap berbagai faktor, mulai dari permasalahan internal, potensi optimalisasi pendapatan, dinamika kebijakan fiskal nasional/regional, hingga tuntutan reformasi birokrasi yang mendesak.

Berikut adalah matriks identifikasi isu strategis Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pandeglang, yang telah dianalisis relevansinya terhadap kewenangan dan lingkup tugas pokok dan fungsi sebagai perangkat daerah yang menaungi urusan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah.





Tabel II.2

## Teknik menyimpulkan isu strategis BPKD Kab. Pandeglang

Potensi Daerah yang menjadi Kewenangan BPKD	Permasalahan BPKD	Isu KLHS yang Relevan Dengan BPKD	Isu lingkungan dinamis yang relevan dengan BPKD			Isu Strategis
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Optimalisasi pengelolaan barang milik pemerintah kabupaten pandeglang	Kemungkinan penurunan Opini WTP atas LKPD Kabupaten Pandeglang	Analisis Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan	Perubahan Iklim dan dampaknya terhadap pengelolaan keuangan daerah	Belum maksimalnya penerapan digitalisasi pengelolaan keuangan daerah baik aspek pendapatan maupun aspek belanja.	Belum optimalnya pengelolaan keuangan daerah	Belum Optimalnya Pengelolaan keuangan dan Barang Milik Daerah di Kabupaten Pandeglang
	Kemungkinan dikeluarkannya kebijakan baru terkait pengelolaan keuangan dan aset daerah yang belum dituangkan dalam peraturan turunan berupa Peraturan Daerah maupun Peraturan Bupati	Identifikasi Resiko Lingkungan	Standar global dalam pengelolaan aset berkelanjutan	Masih kurangnya SDM pengelola keuangan daerah yang tersertifikasi	Belum optimalnya pengelolaan barang milik daerah	
	Kemungkinan terbitnya Perda dan Perbup APBD dan APBD-P tidak tepat waktu	Strategi Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim		Masih adanya daerah yang penetapan APBD-nya belum tepat waktu.	Ketergantungan yang tinggi terhadap dana transfer dalam pengelolaan APBD	
	Ketidaktepatan dalam Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)	Perlindungan Keanekaragaman Hayati		Peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah	Belum optimalnya layanan penunjang urusan perencanaan daerah	
	Belum Optimalnya sumber-sumber pendapatan asli daerah (PAD)			Belum maksimalnya Pembangunan Infrastruktur Daerah melalui Creative Financing, baik pinjaman daerah maupun obligasi daerah.		
	Belum optimalnya perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah			Belum optimalnya pendapatan daerah dalam memberikan kontribusi pada APBD.		

Sumber : Matriks Renstra BPKD Kab. Pandeglang 2025-2029





Dari matriks diatas maka dapat dilihat Teknik pengumpulan isu Strategis BPKD Kabupaten Pandeglang sehingga dapat diuraikan sebagai berikut :

A. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Kebijakan nasional penataan ruang secara formal telah ditetapkan bersamaan dengan dibuatnya undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang penataan ruang yang kemudian diperbaharui dengan undang-undang nomor 26 Tahun 2007. Kebijakan tersebut ditunjukan mewujudkan kualitas tataruang nasional yang semakin baik, yang oleh undang-undang dinyatakan dengan kriteria aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan.

Kabupaten Pandeglang memiliki potensi besar di sektor pariwisata, pertanian, dan kelautan yang harus diatur secara berkelanjutan dalam RTRW. Didalam Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 2 tahun 2020 Tentang perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 3 tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pandeglang Tahun 2011-2031. Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pandeglang tentang RTRW, adapun beberapa kebijakan utama dalam RTRW meliputi:

1. Pengembangan Kawasan Pariwisata : Kabupaten Pandeglang memiliki Kawasan wisata unggulan seperti Geopark Nasional Ujung Kulon yang harus dikelola dan dengan pendekatan konservasi dan ekowisata, serta optimalisasi Kawasan wisata-wisata lainnya;
2. Penguatan Sektor Pertanian dan Perikanan : Kabupaten Pandeglang memiliki lahan pertanian dan laut yang sangat luas sehingga pengelolaan lahan pertanian dan perikanan harus dikelola secara berkelanjutan;
3. Pembangunan Infrastruktur Berbasis Lingkungan : Didalam pengembangan pembangunan jalan, jembatan, dan fasilitas umum





sangat penting dengan memperhatikan dampak lingkungan yang diakibatkan oleh pembangunan tersebut;

4. Penyediaan Kawasan Lindung : menjaga kelestarian Kawasan hutan lindung dan daerah resapan air untuk mencegah terjadinya bencana longsor dan banjir.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan instrument yang digunakan untuk memastikan bahwa kebijakan, rencana, dan program dalam RTRW tidak merusak lingkungan serta sejalan dengan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan. KLHS di Kabupaten Pandeglang mencakup beberapa aspek berikut seperti:

1. Analisis Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan : Pemerintah Daerah harus memastikan pengembangan wilayah tidak melebihi kapasitas ekosistem;
2. Identifikasi Resiko Lingkungan : Mengkaji setiap potensi yang dapat terjadi akibat dampak negatif dari pembangunan, seperti erosi pantai, pencemaran air, dan kerusakan ekosistem hutan;
3. Strategi Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim : Menyusun kebijakan-kebijakan terkait untuk mengurangi dampak penggunaan emisi karbon serta, serta melakukan pemetaan wilayah guna meningkatkan ketahanan wilayah terhadap bencana alam;
4. Perlindungan Keanekaragaman Hayati : Menjaga ekosistem penting seperti hutan bakau, terumbu karang, serta habitat liar termasuk Badak Jawa yang terdapat di Ujung Kulon.

Dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 2 tahun 2020 Tentang perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 3 tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pandeglang Tahun 2011-2031, maka arah pelayanan BPKD didalam Renstra 2025-2029 harus sesuai dengan arah pengembangan wilayah sebagaimana tercantum di RTRW 2031. Kebijakan pengembangan tata ruang sebagai berikut:

1. Penyusunan Anggaran yang berorientasi pada Pembangunan Berkelanjutan;





2. Optimalisasi Pendapatan Daerah untuk Mendukung Tata Ruang dan KHLS;
3. Memberikan insentif bagi Pembangunan Berkelanjutan;
4. Peningkatan Pengawasan dan Evaluasi Penggunaan Anggaran;
5. Kolaborasi dengan instansi terkait.

BPKD selaku Badan yang mengelola urusan keuangan dan barang milik daerah melalui peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan barang milik daerah yang akuntabel, transparan, responsif, dan partisipatif. Dengan mempertimbangkan tugas dan fungsi yang dimiliki serta Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pandeglang. Selanjutnya melakukan identifikasi isu-isu setrategis sebagai berikut :

1. Kemungkinan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Pandeglang belum sesuai dengan perundang-undangan.
2. Banyaknya laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) belum sesuai dengan standar akuntansi pemerintah (SAP) yang telah ditetapkan;
3. Masih rendahnya progress penyelesaian tidak lanjut rekomendasi hasil temuan BPK-RI atas kerugian negara yang telah diakibatkan;
4. Belum optimalnya dukungan dari berbagai pihak / stakeholder di dalam penyusunan kebijakan anggaran;
5. Belum optimalnya dukungan dalam proses tersusunnya Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Bupati (Perbup) APBD dan APBD-P secara tepat waktu ;
6. Inventarisasi barang milik daerah belum terdokumentasi dengan baik;
7. Belum optimalnya pengelolaan barang milik daerah dalam peningkatan pendapatan asli daerah (PAD);
8. Rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang menyebabkan ketidakmandirian fiskal;





9. Belum Optimalnya perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah;

Dari isu-isu diatas maka dapat ditarik kesimpulan isu strategis yang terdapat di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pandeglang adalah “Belum Optimalnya Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah di Kabupaten Pandeglang”.

#### **II.4 Review Terhadap RKPD**

Telaahan terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dilaksanakan dengan tujuan untuk melakukan perbandingan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan—yang disusun berdasarkan analisis kebutuhan dan mempertimbangkan capaian kinerja Renstra Perangkat Daerah—dengan tingkat kinerja aktual yang telah dicapai oleh Perangkat Daerah. Proses ini juga memperhatikan arahan Kepala Daerah terkait prioritas program/kegiatan serta pagu indikatif yang dialokasikan bagi masing-masing Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam RKPD.

Kegiatan review terhadap RKPD mencakup proses identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tolak ukur atau target sasaran program/kegiatan, serta besaran pagu indikatif yang disediakan untuk setiap program/kegiatan pada Perangkat Daerah yang pengelolaan bersangkutan.

Secara sistematis, tahapan identifikasi dan telaahan dilakukan melalui beberapa langkah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi seluruh program dan kegiatan prioritas yang tercantum dalam RKPD.
2. Membandingkan program dan kegiatan tersebut dengan hasil identifikasi kebutuhan yang telah disusun pada tahap analisis sebelumnya.
3. Menyajikan hasil perbandingan dalam bentuk matriks untuk memudahkan analisis, dengan menempatkan program/kegiatan yang sama pada baris yang sama.





4. Memeriksa kesesuaian program dan kegiatan lanjutan dan/atau prioritas Perangkat Daerah dengan isi RKPD, guna memastikan bahwa seluruh kegiatan strategis telah tercantum secara tepat.
5. Untuk program dan kegiatan yang sesuai, proses telaahan meliputi:
  - a) Peninjauan kesesuaian indikator kinerja; apabila tidak sesuai, ditetapkan indikator yang relevan untuk digunakan.
  - b) Kajian terhadap besaran tolok ukur atau target capaian program/kegiatan. Jika terdapat perbedaan, maka dilakukan penyesuaian dengan mempertimbangkan pagu indikatif, target capaian Renstra Perangkat Daerah, serta potensi sumber pendanaan lainnya.
  - c) Pemberian catatan strategis sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan program dan kegiatan dalam Renja Perangkat Daerah.
6. Untuk program dan kegiatan yang tidak sesuai atau berbeda dengan RKPD, dilakukan beberapa langkah berikut:
  - a) Melakukan verifikasi terhadap program/kegiatan yang hanya muncul dalam RKPD atau hanya muncul dalam hasil identifikasi analisis, guna menilai kelayakannya untuk direncanakan. Penilaian mempertimbangkan kebutuhan nyata, sasaran Renstra Perangkat Daerah, kebijakan nasional, pencapaian visi-misi Kepala Daerah, serta ketersediaan pendanaan.
  - b) Menentukan indikator kinerja yang tepat berdasarkan kajian ulang terhadap dokumen RKPD.
  - c) Menetapkan kembali besaran tolok ukur atau target capaian program/kegiatan dengan mempertimbangkan pagu indikatif, target Renstra Perangkat Daerah, dan potensi sumber dana lainnya.
  - d) Memberikan catatan penting sebagai dasar pengambilan keputusan terhadap kelanjutan program/kegiatan dalam Renja Perangkat Daerah.





7. Merumuskan kebutuhan program dan kegiatan hasil review terhadap RKPD secara lengkap, mencakup lokasi, indikator kinerja, besaran target/tolok ukur, serta kebutuhan pendanaan untuk setiap program/kegiatan.
8. Mengidentifikasi program dan kegiatan yang akan didanai melalui APBD berdasarkan objek pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah.

Tahapan telaahan tersebut menjadi landasan strategis dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah, sehingga seluruh program dan kegiatan yang direncanakan selaras dengan dokumen perencanaan daerah, kebijakan Kepala Daerah, serta kerangka pendanaan yang tersedia.

Dari Tabel II.6 tersebut diketahui bahwa RKPD anggaran BPKD sama dengan hasil analisis kebutuhan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2026. Berdasarkan Tabel II.6 diketahui bahwa pada Tahun 2026 BPKD sebesar Rp558.444.408.176.00 Adapun jumlah program dan kegiatan sudah sesuai dengan RKPD 2026.





## II.4 Reviu Terhadap RKPD

Tabel II.3

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2026 Kabupaten Pandeglang

RKPD 2025					Hasil Kebutuhan 2026				
Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Jumlah (Rp)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Jumlah (Rp)
<b>KEUANGAN</b>				<b>558.444.408.176</b>	<b>KEUANGAN</b>				<b>558.444.408.176</b>
<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>				<b>489.980.919.745</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>				<b>489.980.919.745</b>
Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Kab.Pandeglang	1. Persentase jumlah Perda dan Perbup RAPBD dan RAPBD-P tepat waktu;  2. Persentase penyusunan kebijakan pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah.	100%  100%	1.200.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Kab.Pandeglang	1. Persentase jumlah Perda dan Perbup RAPBD dan RAPBD-P tepat waktu;  2. Persentase penyusunan kebijakan pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah.	100%  100%	1.200.000.000
Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Kab.Pandeglang	Persentase Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah Sesuai Standar	100%	250.000.000	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Kab.Pandeglang	Persentase Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah Sesuai Standar	100%	250.000.000





RKPD 2025					Hasil Kebutuhan 2026				
Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Jumlah (Rp)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Jumlah (Rp)
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Kab.Pandeglang	Persentase Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah Sesuai Standar	100%	430.000.000	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Kab.Pandeglang	Persentase Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah Sesuai Standar	100%	430.000.000
Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Kab.Pandeglang	Indeks Kapasitas fiskal daerah	0,84	488.030.919.745	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Kab.Pandeglang	Indeks Kapasitas fiskal daerah	0,84	488.030.919.745
Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Kab.Pandeglang	Persentase Pengelolaan data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Sesuai Standar	100%	70.000.000	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Kab.Pandeglang	Persentase Pengelolaan data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Sesuai Standar	100%	70.000.000
<b>PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH</b>				<b>700.000.000</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH</b>				<b>700.000.000</b>
Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kab.Pandeglang	1. Jumlah tanah milik daerah yang didaftarkan untuk penerbitan sertifikat; 2. Persentase barang milik	219 20,29 %	700.000.000	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kab.Pandeglang	1. Jumlah tanah milik daerah yang didaftarkan untuk penerbitan sertifikat; 2. Persentase barang milik daerah	219 20,29 %	700.000.000





RKPD 2025					Hasil Kebutuhan 2026				
Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Jumlah (Rp)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Jumlah (Rp)
		daerah yang dimanfaatkan;  3.Persentase SKPD menyampaikan laporan Barang Milik Daerah sesuai peraturan perundang-undangan dan tepat waktu;	100%				yang dimanfaatkan;  3.Persentase SKPD menyampaikan laporan Barang Milik Daerah sesuai peraturan perundang-undangan dan tepat waktu;	100%	
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>				<b>67.763.488.431</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>				<b>67.763.488.431</b>
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab.Pandeglang	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu dan sesuai ketentuan;	100%	44.900.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab.Pandeglang	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu dan sesuai ketentuan;	100%	44.900.000





RKPD 2025					Hasil Kebutuhan 2026				
Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Jumlah (Rp)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Jumlah (Rp)
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab.Pandeglang	Persentase administrasi keuangan perangkat daerah yang tertib dan sesuai standar akuntansi pemerintahan (SAP);	100%	66.101.825.176	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab.Pandeglang	Persentase administrasi keuangan perangkat daerah yang tertib dan sesuai standar akuntansi pemerintahan (SAP);	100%	66.101.825.176
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kab.Pandeglang	Persentase penatausahaan dan pelaporan Barang Milik Daerah (BMD) yang sesuai ketentuan;	100%	4.000.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kab.Pandeglang	Persentase penatausahaan dan pelaporan Barang Milik Daerah (BMD) yang sesuai ketentuan;	100%	4.000.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab.Pandeglang	Persentase ketertiban administrasi umum pada perangkat daerah;	100%	536.900.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab.Pandeglang	Persentase ketertiban administrasi umum pada perangkat daerah;	100%	536.900.000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab.Pandeglang	Persentase pengadaan barang milik daerah yang sesuai ketentuan dan tepat waktu;	100%	149.623.255	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab.Pandeglang	Persentase pengadaan barang milik daerah yang sesuai ketentuan dan tepat waktu;	100%	149.623.255
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	Kab.Pandeglang	Persentase penyediaan jasa penunjang yang	100%	602.040.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	Kab.Pandeglang	Persentase penyediaan jasa penunjang yang	100%	602.040.000





RKPD 2025					Hasil Kebutuhan 2026				
Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Jumlah (Rp)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Jumlah (Rp)
Pemerintahan Daerah		sesuai kebutuhan dan standar pelayanan;			Pemerintahan Daerah		sesuai kebutuhan dan standar pelayanan;		
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab.Pandeglang	Persentase barang milik daerah penunjang yang terpelihara dalam kondisi baik.	100%	324.200.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab.Pandeglang	Persentase barang milik daerah penunjang yang terpelihara dalam kondisi baik.	100%	324.200.000





## II.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Dari Masyarakat

Dalam rangka menjaring aspirasi usulan Masyarakat pada tahap perencanaan dan penganggaran tentunya harus memperhatikan keterlibatan stakeholder terutama Masyarakat agar kebutuhan dan kepentingannya dapat terwakili. Selanjutnya secara tahapan usulan-usulan Masyarakat telah berproses mulai dari usulan, verifikasi, validasi dan penganggaran Dimana mekanisme atau pembiayaan disalurkan melalui belanja Analisis perencanaan dan penyaluran bantuan keuangan, pengelolaan dana darurat dan mendesak, dan pengelolaan dana bagi hasil kabupaten/kota. Hal ini sudah diperhatikan sesuai koridor dengan kewenangan, urusan dan kemampuan keuangan pemerintah daerah.





# BAB III

## TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH





### III.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai Perangkat Daerah memiliki kewajiban untuk mewujudkan akuntabilitas kinerjanya, dimana akuntabilitas kinerja instansi pemerintah memiliki makna perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik, berdasarkan kebijakan yang telah disepakati maka program perlu ditetapkan dalam upaya pencapaian misi yang telah ditetapkan, program Renja Perangkat Daerah identik dengan program pada Renstra Perangkat Daerah.

Dengan tetap memperhatikan kebijakan, program adalah suatu upaya cara bertindak dalam upaya pencapaian misi, selama kurun waktu tertentu secara operasional (tahunan) dilaksanakan melalui kegiatan program. Tujuan program merupakan tujuan akhir dari pelaksanaan program, setelah program dilaksanakan melalui beberapa kegiatan. Tujuan program akan tercapai. Apabila sasaran program tercapai artinya bahwa tujuan program akibat dari sasaran program yang merupakan suatu pernyataan yang ingin dicapai pada tingkat program untuk kepentingan sekelompok masyarakat dan atau wilayah dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, terdapat 5 arahan utama presiden, yaitu:

1. Pembangunan SDM;
2. Pembangunan Infrastruktur;
3. Penyederhanaan Regulasi;
4. Penyederhanaan Birokrasi;
5. Transformasi Ekonomi.

Dalam RPJMN, pemerintah akan memprioritaskan pembangunan nasional untuk mencapai kedaulatan pangan, ketersediaan energi dan





pengelolaan sumber daya maritim serta kelautan dalam lima tahun ke depan. Pemerintah juga berkomitmen mengarahkan pembangunan untuk mencapai peningkatan kesejahteraan berkelanjutan, dengan mendorong warga Indonesia memiliki jiwa gotong royong, dan harmonis dalam kehidupan antar kelompok sosial. Pemerintah juga ingin agar postur perekonomian dapat sesuai dengan pertumbuhan yang berkualitas. Artinya, pertumbuhan ekonomi harus bersifat inklusif, berbasis luas, dan berlandaskan keunggulan sumber daya manusia serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pertumbuhan berkualitas dicapai secara bersamaan dengan meraih keseimbangan antarsektor ekonomi dan antarwilayah, dan mencerminkan keharmonisan antara manusia dan lingkungan.

Dalam satu tahun pertama, agenda pembangunan bertujuan membangun fondasi untuk akselerasi pembangunan yang berkelanjutan pada tahun-tahun berikutnya. Untuk agenda pembangunan lima tahun ke depan, pemerintah akan meletakkan fondasi yang kokoh bagi proses pembangunan selanjutnya.

Dengan demikian, strategi pembangunan jangka menengah, termasuk di dalamnya strategi pada tahun pertama, adalah strategi untuk menghasilkan pertumbuhan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat secara berkelanjutan.

Pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota harus mendukung tercapainya sasaran dan bidang-bidang pembangunan nasional tersebut sesuai dengan potensi dan kondisi masing-masing daerah, mengingat keberhasilan pencapaian sasaran dan bidang-bidang pembangunan nasional dimaksud sangat tergantung pada sinkronisasi kebijakan antara pemerintah provinsi dengan pemerintah dan antara pemerintah kabupaten/kota dengan pemerintah dan pemerintah provinsi yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).





## A. Rencana Kerja Kementerian Keuangan

Kementerian Keuangan sebagai sebuah institusi publik yang menahkodai kebijakan fiskal memiliki peran yang strategis dalam menata Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk mewujudkan arah kebijakan dan strategi nasional sebagaimana tercantum dalam RPJMN Tahun 2015- 2019. Peran tersebut terlihat dalam dukungan Kementerian Keuangan dalam upaya pencapaian Nawa.

Cita yang merupakan agenda prioritas Pemerintahan Kabinet Kerja. Berdasarkan identifikasi yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan telah mendapatkan persetujuan oleh Bappenas, disepakati bahwa Kementerian Keuangan mendukung secara langsung pencapaian Nawa Cita 1, Nawa Cita 3, Nawa Cita 6, dan Nawa Cita 7. Dukungan tersebut diwujudkan dalam penetapan Kegiatan Prioritas yang dilaksanakan oleh beberapa unit kerja pada Kementerian Keuangan yang dapat secara langsung berkontribusi terhadap pencapaian.

Nawa Cita. Sedangkan untuk Nawa Cita 2, Nawa Cita 4, Nawa Cita 5, Nawa Cita 8, dan Nawa Cita 9, walaupun Kementerian Keuangan tidak berperan langsung dalam pencapaiannya, Kementerian Keuangan tetap menunjukkan komitmen yang besar dalam mendukung dan mengimplementasikannya di lingkungan Kementerian Keuangan.

Keterlibatan Kementerian Keuangan terhadap Nawa Cita 1 "Menghadirkan Kembali Negara untuk Melindungi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga Negara" adalah pada upaya mewujudkan 2 (dua) tema. Pertama adalah "Memperkuat Jatidiri Sebagai Negara Maritim" yang diwujudkan melalui upaya peningkatan kapasitas sarana dan prasarana surveillance di antaranya Hi-Co Scan Container serta pembangunan kapal patroli interceptor (speedboat) sebagai upaya





meningkatkan pengawasan dan penjagaan, serta penegakan hukum di laut dan daerah perbatasan. Kedua, pada tema “Memperkuat Peran Dalam Kerja sama Global dan Regional”, peran Kementerian Keuangan diwujudkan di antaranya dengan meningkatkan partisipasi aktif dan strategis Indonesia dalam forum APEC dan G-20 serta pelaksanaan kegiatan pelatihan internasional dengan beberapa negara ASEAN dalam hal analisis fiskal dan capital market. Selain itu, peran Kementerian Keuangan sebagai tuan rumah berbagai konferensi internasional seperti sidang tahunan IMF-World Bank pada tahun 2018 juga diharapkan mampu meningkatkan kontribusi Indonesia dalam kancah perekonomian global.

Terkait dengan Nawa Cita 3 “Membangun Indonesia dari Pinggiran dengan Memperkuat DaerahDaerah dan Desa Dalam Kerangka Negara Kesatuan”, Kementerian Keuangan mendukung pencapaian 3 (tiga) tema.

Pada tema pertama, “Pengembangan Kawasan Perbatasan“, Kementerian Keuangan secara aktif telah membuat perjanjian dengan negara-negara tetangga dengan menandatangani Border Trade Agreement (BTA) serta mengembangkan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu di berbagai kawasan perbatasan serta meningkatkan kualitas sarana dan prasarana operasi dan pengawasan di kawasan perbatasan.

Pada tema kedua, “Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan”, Kementerian Keuangan mengawal implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa secara sistematis, konsisten, dan berkelanjutan yang diwujudkan melalui upaya Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN. Selanjutnya, untuk menjamin pembangunan desa yang berpihak pada pengentasan kemiskinan dan menstimulus kapasitas masyarakat desa, telah





ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN. Adapun pada tema ketiga, “Penguatan Tata Kelola Pemerintah Daerah dan Peningkatan Kualitas Pemerintahan Daerah”, Kementerian Keuangan berfokus pada strategi peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah dengan titik berat pada kualitas belanja dan perbaikan pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD). Hal ini dilakukan untuk menjaga perekonomian tetap kondusif melalui penyusunan regulasi pengelolaan keuangan daerah sesuai best practice. Selain itu, Kementerian Keuangan juga melakukan strategi perbaikan regulasi pajak daerah dan retribusi daerah serta penajaman metode peningkatan kapasitas pemerintah daerah, baik kelembagaan maupun Sumber Daya Manusia (SDM). Di samping itu, dilaksanakan pula reformulasi penerapan reward yang memenuhi kriteria kompetitif, adil dan kredibel.

Pada Nawa Cita 6 “Meningkatkan Produktivitas Rakyat dan Daya Saing di Pasar Internasional”, peran Kementerian Keuangan diwujudkan melalui dukungan terhadap 3 (tiga) tema. Pada tema pertama “Membangun Perumahan dan Kawasan Permukiman”, Kementerian Keuangan berkontribusi dalam optimalisasi penyediaan layanan air minum, melalui fasilitasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) melalui restrukturisasi utang PDAM. Pada tema kedua, “Peningkatan Efektivitas dan Efisiensi Dalam Pembiayaan Infrastruktur”, komitmen Kementerian Keuangan diwujudkan melalui penguatan peranan dan kebijakan dalam mendukung pembangunan proyek Kerja sama Pemerintah-Swasta (KPS) dengan penyediaan dukungan pemerintah dan diversifikasi pembiayaan infrastruktur, pengelolaan dukungan pemerintah dan





sistem penjaminan terkait dengan sistem investasi pada proyek-proyek yang berbasis KPS serta strategi memaksimalkan pemanfaatan pinjaman untuk belanja modal terutama infrastruktur. Dukungan Kementerian Keuangan pada tema ketiga, “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Nasional Melalui Peningkatan Hasil Tambang”, berupa penerapan insentif fiskal dan non-fiskal, untuk mendorong investasi pengembangan industri pengolahan dan pemurnian di dalam negeri melalui pengembangan insentif keringanan bea keluar, tax allowance dan skema pembayaran royalti bagi perusahaan smelter yang terintegrasi dengan perusahaan tambang. Selanjutnya, pada Nawa Cita 7 “Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dengan Menggerakkan Sektor-Sektor Strategis Ekonomi Domestik”, Kementerian Keuangan fokus pada 2 (dua) tema. Terkait dengan tema pertama, “Penguatan Sektor Keuangan”, Kementerian Keuangan telah mengupayakan peningkatan koordinasi kebijakan terkait stabilitas sistem keuangan dan penyusunan payung regulasi Undang-Undang Jaring Pengaman Sistem Keuangan. Sedangkan untuk tema kedua, “Penguatan Kapasitas Fiskal Negara”, pada periode 2015-2019, Kementerian Keuangan fokus pada upaya pementapan penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) dan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM), ekstensifikasi dan intensifikasi pajak, menciptakan mekanisme monitoring dan evaluasi atas penyerapan belanja dan pengukuran-pengukuran terkait efektivitas penyerapannya melalui spending review, perencanaan dan pemanfaatan pinjaman untuk kegiatan produktif, serta mempertajam program Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik agar dapat meminimalkan tumpang tindih penganggaran pusat dan daerah.





### 1) Visi Kementerian Keuangan

Visi Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024 adalah Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan untuk Mendukung Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: "Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong".

### 2) Misi Kementerian Keuangan

Kementerian Keuangan melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden Nomor 2 (Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing) dan Nomor 3 (Pembangunan yang merata dan berkeadilan), dengan upaya:

1. Menerapkan kebijakan fiskal yang responsif dan berkelanjutan;
2. Mencapai tingkat pendapatan negara yang tinggi melalui pelayanan prima serta pengawasan dan penegakan hukum yang efektif;
3. Memastikan belanja negara yang berkeadilan, efektif, efisien, dan produktif;
4. Mengelola neraca keuangan pusat yang inovatif dengan risiko minimum;
5. Mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital dan pengelolaan Sumber Daya Manusia yang adaptif sesuai kemajuan teknologi.

### 3) Tujuan Kementerian Keuangan

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi presiden ditetapkan lima tujuan Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024 yaitu:

1. Pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan;
2. Penerimaan negara yang optimal;
3. Pengelolaan belanja negara yang berkualitas;





4. Pengelolaan perbendaharaan, kekayaan negara, dan pembiayaan yang akuntabel dan produktif dengan risiko yang terkendali;
5. Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien.

#### **4) Sasaran Strategis Kementerian Keuangan**

Dalam rangka mendukung pencapaian kelima tujuan Kementerian Keuangan telah menetapkan sepuluh sasaran strategis yang merupakan kondisi yang diinginkan untuk dicapai oleh Kementerian Keuangan selama tahun 2025-2029 yaitu:

1. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan Pengelolaan Fiskal yang Sehat dan Berkelanjutan adalah kebijakan fiskal yang ekspansif konsolidatif;
2. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan Penerimaan Negara yang Optimal adalah penerimaan negara dari sektor pajak, kepabeanan dan cukai serta PNBP yang optimal;
3. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan Pengelolaan Belanja Negara yang Berkualitas adalah alokasi belanja pusat dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) yang tepat;
4. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Pembiayaan yang Akuntabel dan Produktif dengan Risiko yang Terkendali adalah:
  - a. Pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran belanja pemerintah yang efektif, efisien, dan akuntabel;
  - b. Pengelolaan kekayaan negara yang lebih efisien dan efektif serta memberi manfaat finansial; dan
  - c. Pengelolaan pembiayaan yang optimal dan risiko keuangan negara yang terkendali.





5. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien adalah:
  - a. Organisasi dan SDM yang optimal;
  - b. Sistem informasi yang andal dan terintegrasi;
  - c. Pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah; dan
  - d. Pelaksanaan tugas khusus yang optimal.

## **B. Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Banten**

Berdasarkan Visi dan Misi Pembangunan Daerah Tahun 2017-2022, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mendukung mewujudkan Visi “BANTEN YANG MAJU, MANDIRI, BERDAYA SAING, SEJAHTERA DAN BERAKHLAQUL KARIMAH”. Visi tersebut mempunyai makna:

- i. Provinsi Banten yang Maju berarti adanya perubahan dan kondisi semula ke arah yang lebih baik. Cara-cara lama dalam mengelola pemerintahan ditinggalkan, selanjutnya cara baru dalam mengelola pemerintahan yang menerapkan prinsip-prinsip good governance. Beberapa indikator indikator pengelolaan pemerintahan yang lebih maju adalah: adanya inovasi dalam tata kelola pemerintahan (lebih efisien, efektif, transparan, akuntabel disertai perbaikan hubungan kelembagaan dengan kabupaten/kota), dan adanya perubahan mindset atau perubahan budaya lama yang tidak sesuai dengan tuntutan masyarakat;
- ii. Provinsi Banten yang Mandiri mengacu pada kemampuan keuangan daerah untuk mendukung dan menjalankan pembangunan daerah. Suatu daerah dikatakan mandiri bila pendapatan asli daerahnya dalam APBD cukup dominan, sehingga tidak tergantung oleh bantuan atau subsidi pemerintah pusat. Beberapa indikator Mandiri disini





- menunjukkan kemampuan fiskal yang cukup untuk merealisasikan berbagai program pemerintah daerah;
- iii. Provinsi Banten yang Berdaya Saing berarti kemampuan daerah mengelola dan mengembangkan segenap potensi yang dimiliki serta menghilangkan berbagai hambatan sehingga berhasil menjadi tujuan investasi dibandingkan dengan daerah lainnya. Beberapa parameter berdaya saing ini, berupa kemudahan, fasilitasi dan daya tarik investasi di provinsi Banten infrastruktur yang memadai, keamanan yang terjamin, pelayanan perijinan yang mudah dan berkepastian hukum, sumber daya manusia yang berkualitas, serta ketersediaan energy;
  - iv. Provinsi Banten yang Sejahtera berarti kemampuan daerah dalam mengelola aspek manusia yang diukur dengan pencapaian angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Beberapa parameter Sejahtera, diukur dengan angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yang pencapaiannya melalui kontribusi tiga indikator utama yaitu pencapaian indikator pendidikan, pencapaian indikator kesehatan, dan pencapaian indikator daya beli masyarakat;
  - v. Provinsi Banten yang Akhlakul Karimah berarti harapan daerah dalam menekankan pada perilaku kehidupan masyarakat dan pemerintah yang mencerminkan penerapan nilai-nilai agama, yaitu nilai-nilai yang sesuai dengan hakikat ketuhanan, keberadaan manusia berserta alam seisinya. Beberapa parameter akhlakul karimah ini, tingkat kerukunan umat beragama pada masyarakat, implemetasi terhadap rumusannya pada lingkungan aparatur pemerintahan daerah, dan lingkungan pendidikan dengan partisipasi tokoh masyarakat dan alim ulama di Provinsi Banten.





Misi adalah pernyataan tentang upaya yang harus dilakukan dalam usaha mewujudkan Visi. Misi juga akan memberikan arah sekaligus batasan proses pencapaian tujuan. Oleh karena itu, untuk mewujudkan Visi Provinsi Banten 2017-2022 tersebut akan ditempuh melalui 5 (lima) misi pembangunan daerah sebagai berikut:

1. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance);
2. Membangun dan meningkatkan kualitas infrastruktur;
3. Meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan Pendidikan berkualitas;
4. Meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan Kesehatan berkualitas;
5. Meningkatkan kualitas pertumbuhan dan pemerataan ekonomi.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Banten bertanggung jawab untuk mendukung Misi ke 1 yaitu “Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan yang baik (Good Governance)”. Misi ini dimaksudkan bahwa untuk mewujudkan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang profesional, efektif, efisien, transparan dan akuntabel perlu dilakukan upaya peningkatan kualitas dan kapasitas aparatur, pengelolaan keuangan dan kinerja penyelenggaraan.

pemerintahan daerah serta pelayanan publik yang didukung oleh sarana bangunan kantor dan prasarana pemerintahan yang representatif, serta pemanfaatan teknologi dan sistem informasi yang terintegrasi.

Selanjutnya BPKAD dalam mewujudkan pencapaian Misi ke 1 (satu) tersebut mengacu pada tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan jangka menengah daerah yang tertuang dalam RPJMD. Adapun tujuan sasaran, strategi dan arah kebijakan dalam RPJMD





yang sesuai dengan tugas dan fungsi BPKAD Provinsi Banten adalah:

Tujuan dari Misi ke 1 (satu) Terwujudnya kelembagaan pemerintahan daerah yang berakhlakul karimah dengan efektif, efisien, transparan, akuntabel dan sumber daya aparatur berintegritas, berkompetensi serta melayani masyarakat, dengan sasaran:

- i. Sasaran ke 1 (satu) yaitu meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien melalui Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi.
- ii. Sasaran ke 4 (empat) yaitu meningkatnya pengelolaan keuangan dan aset yang akuntabel, melalui (1) Program Pengelolaan Keuangan Daerah, (2) Program Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Dengan mengacu pada tujuan sasaran, strategi dan arah kebijakan dalam RPJMD tersebut di atas, maka disusun tujuan dan sasaran jangka menengah BPKAD beserta indikator kerjanya yang telah ditetapkan dalam renstra BPKAD Provinsi Banten 2023-2026.

### **III.2 Tujuan dan Sasaran Renja BPKD Kab Pandeglang**

#### **A. Visi Pemerintah Kabupaten Pandeglang**

Dengan mempertimbangkan tugas pokok dan fungsi yang dimiliki serta visi dan misi Bupati Pandeglang yang tercantum didalam RPJMD Kabupaten Pandeglang Tahun 2025-2029, dengan Visi

**“Pandeglang Maju Melalui Infrastruktur Mantap, Pertumbuhan  
Ekonomi dan Keluarga Sejahtera”**

Pernyataan visi tersebut mengandung rumusan yang hendak diwujudkan oleh pemerintah saat ini hingga 5 (lima) tahun kedepan, yakni menjadikan BPKD sebagai Lembaga yang professional dalam mengelolan keuangan daerah, dalam arti:

- 1) Pandeglang → Fokus utama pembangunan daerah.





- 2) Maju → Kemajuan dalam infrastruktur, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat.
- 3) Melalui → Strategi utama yang digunakan.
- 4) Infrastruktur Mantap → Pembangunan sarana dan prasarana berkualitas guna menunjang aktivitas masyarakat.
- 5) Pertumbuhan Ekonomi → Pengembangan sektor unggulan, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan.
- 6) Keluarga Sejahtera → Tujuan akhir pembangunan, mencakup kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial.

#### **B. Misi Pemerintah Kabupaten Pandeglang:**

1. Meningkatkan akses infrastruktur dasar yang mendukung konektivitas, pendidikan, kesehatan, perekonomian unggulan dan resiliensi bencana.
2. Meningkatkan daya saing ekonomi melalui peningkatan kemandirian fiskal, kemudahan investasi dan ekonomi berkelanjutan, pemberdayaan pemuda berbasis ekonomi kreatif, serta kemitraan UMKM pondok pesantren.
3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing SDM melalui penurunan kemiskinan ekstrim dan penuntasan stunting.

#### **Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang profesional dan adaptif.**

untuk mewujudkan misi diatas yaitu “Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang professional dan adaptif”. Maka diturunkanlah misi tersebut menjadi sasaran strategis Pemerintah Daerah yang kemudian menjadi tujuan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pandeglang, yaitu “Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah”

#### **C. Tujuan Rencana Strategis BPKD Kabupaten Pandeglang**

Tujuan yang akan dicapai oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pandeglang didapat dari sasaran strategis Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang yang kemudian menjadi





tujuan perangkat daerah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pandeglang adalah:

“Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah” dengan indikator tujuan “Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)”

#### **D. Sasaran Renstra BPKD Kab. Pandeglang Tahun 2025-2030**

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam hal ini BPKD Kabupaten Pandeglang dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dan dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Selain itu dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran. Yang dimaksud dengan indikator sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran yang akan diwujudkan pada tahun bersangkutan.

Dengan demikian sasaran merupakan sesuatu yang akan dicapai setiap tahunnya dalam kurun waktu tahun 2025-2029 yang berfokus pada Tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan atau operasional organisasi. Adapun sasaran yang telah ditetapkan oleh BPKD Kabupaten Pandeglang:





Tabel III. 1

Matriks Tujuan dan Sasaran Renstra BPKD Kab. Pandeglang 2025-2029

Tujuan	: Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah
Indikator Tujuan	: Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)
Sasaran	: Meningkatnya Kualitas LKPD (Laporan Keuangan Pemerintah Daerah)
Indikator Sasaran	: Opini BPK atas audit laporan keuangan Pemerintah Daerah
Tujuan	: Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah
Indikator Tujuan	: Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)
Sasaran	: Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Indikator Sasaran	: Persentase realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Tujuan	: Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah
Indikator Tujuan	: Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)
Sasaran	: Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah
Indikator Sasaran	: Nilai AKIP Perangkat Daerah

Sumber : Matriks Renstra BPKD Kab. Pandeglang 2025-2029

Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh BPKD Kabupaten Pandeglang pada tahun 2026 serta indikator pencapaiannya sebagaimana disajikan dalam tabel 3.2 berikut :

Tabel III.2

Teknik merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra BPKD Kabupaten Pandeglang 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Meningkatnya tatakelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah		Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	77,7	79,7	81,7	83,7	85,7	87,7	
		Meningkatnya Kualitas LKPD (laporan keuangan pemerintah daerah)	Opini BPK atas audit laporan pemerintah daerah	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	





NSPK DAN SASARAN RPJMD RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		Meningkatnya Penerimaan Asli Pendapatan Daerah (PAD)	Persentase Realisasi Penerimaan Asli Pendapatan Daerah (PAD)	80%	82%	84%	86%	88%	90%	
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	75	76	77	79	80	81	

Sumber : Matriks Renstra BPKD Kab. Pandeglang 2025-2029

Dalam upaya meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas tata kelola pemerintahan, Kabupaten/Pemerintah Daerah menetapkan beberapa sasaran strategis dalam dokumen perencanaan jangka menengah daerah (RPJMD), yang dijabarkan dalam indikator kinerja dan target tahunan hingga tahun 2030.

1. Dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah, ditetapkan indikator berupa Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD). Target IPKD secara bertahap meningkat dari 77,7 pada tahun 2025, menjadi 79,7 pada 2026, dan terus naik hingga mencapai 87,7 pada tahun 2030.
2. Untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD), sasaran yang ditetapkan adalah mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) setiap tahun mulai 2025 hingga 2030. Konsistensi WTP ini mencerminkan komitmen daerah dalam mewujudkan laporan keuangan yang transparan dan akuntabel.
3. Terkait penerimaan daerah, target diarahkan pada peningkatan Persentase Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Target realisasi PAD ditetapkan sebesar 80% pada tahun 2025 dan meningkat secara bertahap sebesar 2% tiap tahun hingga mencapai 90% pada tahun 2030. Ini menunjukkan upaya serius pemerintah daerah dalam meningkatkan kemandirian fiskal.
4. Untuk mewujudkan Meningkatnya Kualitas Perencanaan Perangkat Daerah, indikator yang digunakan adalah Predikat Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Perangkat Daerah. Nilai





AKIP ditargetkan naik dari 75 di tahun 2025 menjadi 81 di tahun 2030, menggambarkan dorongan peningkatan kualitas kinerja aparatur sipil negara.

#### **E. Strategi BPKD Kab. Pandeglang dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2030**

Menimbang jangkauan target makro Kabupaten Pandeglang sebagaimana yang telah dipaparkan diatas, maka kondisi yang diharapkan untuk Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pandeglang yang mempunyai strategi sebagaimana berikut:

##### **a) Backward Integration Strategy**

Adalah strategi untuk mendapatkan informasi mengenai pola dan produk pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta strategi untuk mengendalikan sumber-sumber informasi yang akan dijadikan bahan masukan dalam penyusunan sistem pengelolaan keuangan dan barang milik daerah. Strategi yang dapat diterapkan antara lain:

1. Menentukan sistem, mekanisme dan produk pengelolaan keuangan dan barang milik daerah secara konstruktif sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku dan dapat menampung seluruh kepentingan stakeholder.
2. Mengelola sistem pengelolaan keuangan dan barang milik daerah secara berkesinambungan berdasarkan SOP yang tepat didukung oleh sumber daya manusia dan teknologi yang berkualitas.

##### **b) Forward Integration Strategy**

Adalah strategi untuk mengendalikan konsistensi pelaksanaan tugas pengelolaan keuangan dan barang milik daerah sesuai dengan sistem yang telah ditetapkan serta untuk mengantisipasi jika terjadi permasalahan dan perubahan sistem. Strategi yang dapat diterapkan antara lain:

1. Mencari sistem sistem pengelolaan keuangan dan barang milik daerah yang efektif dan efisien sesuai dengan potensi yang dimiliki serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;





2. Mencari alternatif sistem pengelolaan keuangan dan barang milik daerah yang secara teknis perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan, sesuai dengan tingkat kompetensi dan kapasitas SDM yang dimiliki;
3. Mencari alternatif sistem pengelolaan keuangan dan barang milik daerah yang sesuai dengan kualitas dan kuantitas sarana prasarana kantor setiap unit kerja sehingga mampu mendukung proses perencanaan, pengendalian dan perbaikan manajemen keuangan daerah.

### c) Horizontal Integration Strategy

Horizontal Integration Strategy adalah strategi untuk mengendalikan seluruh sistem pengelolaan keuangan dan barang milik daerah di semua lini unit kerja agar sesuai dengan sistem yang telah ditetapkan. Strategi yang dapat diterapkan antara lain:

1. Menjaga agar semua unit kerja secara konsisten menerapkan sistem pengelolaan keuangan dan barang milik daerah yang telah ditetapkan;
2. Memantau agar semua unit kerja melaksanakan sistem pengelolaan keuangan dan barang milik daerah sesuai dengan mekanisme dan SOP yang telah dibuat;
3. Mengevaluasi bahwa semua unit kerja memiliki SDM dan teknologi yang memadai untuk melaksanakan sistem pengelolaan keuangan dan barang daerah yang ditetapkan dan mengikuti mekanisme dan SOP yang telah dibuat.

Tabel III.3

#### Penetapan Renja BPKD Kab Pandeglang 2026

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Menentukan sistem, mekanisme dan produk pengelolaan keuangan dan	1. Mengelola sistem pengelolaan keuangan dan barang milik daerah secara berkesinam-	1. Mengevaluasi sistem sistem pengelolaan keuangan dan barang milik daerah yang	1. Menjaga agar semua unit kerja secara konsisten menerapkan sistem	1. Terwujudnya semua unit kerja memiliki SDM dan teknologi yang memadai untuk





Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
barang milik daerah secara konstruktif sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku dan dapat menampung seluruh kepentingan stakeholder.	bungan berdasarkan SOP yang didukung oleh sumber daya manusia dan teknologi yang berkualitas.	efektif dan efisien sesuai dengan potensi yang dimiliki serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku  2.Mencari alternatif sistem pengelolaan keuangan dan barang milik daerah yang secara teknis perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan, sesuai dengan tingkat kompetensi dan kapasitas SDM yang dimiliki;  3.Mencari alternatif sistem pengelolaan keuangan dan barang miik daerah yang sesuai dengan kualitas dan kuantitas sarana prasarana kantor setiap unit kerja sehingga mampu mendukung proses perencanaan, pengendalian dan perbaikan manajemen keuangan daerah.	pengelolaan keuangan dan barang milik daerah yang telah ditetapkan;  2.Melakukan monitoring agar semua unit kerja melaksanakan sistem pengelolaan keuangan dan barang milik daerah sesuai dengan mekanisme dan SOP yang telah dibuat	melaksanakan sistem pengelolaan keuangan dan barang daerah yang ditetapkan dan mengikuti mekanisme dan SOP yang telah dibuat

Sumber : Matriks Renstra BPKD Kab. Pandeglang 2025-2029

**F. Arah Kebijakan BPKD Kab. Pandeglang dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029**

Operasionalisasi NSPK merupakan proses pengimplementasian Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria ke dalam kegiatan operasional instansi pemerintah agar selaras dengan kebijakan nasional dan prinsip





good governance. Tujuannya adalah untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Tabel III.4  
Implementasi NSPK pada BPKD Kab. Pandeglang

Komponen NSPK	Implementasi di BPKD Kab. Pandeglang
(1)	(2)
<b>Norma</b>	Penetapan APBD tepat waktu dan akuntabilitas keuangan daerah.
<b>Standar</b>	Mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
<b>Prosedur</b>	SOP pengajuan SPM, verifikasi SP2D, pelaporan keuangan dan barang miik daerah triwulan.
<b>Kriteria</b>	Penilaian kinerja pengelolaan keuangan daerah oleh Inspektorat dan BPK.

Sumber : Hasil Analisis NSPK BPKD Kab. Pandeglang 2025-2029

Tabel III.5  
Arah Kebijakan NSPK pada BPKD Kab. Pandeglang

No	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA BPKD	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya Kualitas Laporan keuangan LKPD	Mengimplementasikan penggunaan anggaran berbasis prioritas pembangunan dengan prinsip money follows program dalam penentuan anggaran belanja dengan memperhatikan belanja tidak langsung dan belanja langsung yang mendukung terhadap pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Pandeglang, serta menggunakan anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap pengguna anggaran secara terukur	1. Meningkatkan kepatuhan terhadap Standar Akuntansi Pemerintah (SAP); 2. Penguatan Sistem Akuntansi; 3. Meningkatkan Koordinasi antara BPKD dan SKPD; 4. penyusunan regulasi dilakukan secara komperhensif; 5. Penguatan regulasi dan kepatuhan terhadap jadwal penyusunan APBD; 6. Optimalisasi perencanaan dan sinkronisasi kebijakan antar SKPD; 7. Melakukan Penyelarasan antara kebijakan Pusat dan Daerah; 8. Penguatan Regulasi dan Standarisasi Inventarisasi BMD; 9. Digitalisasi dan Penguatan Sistem Informasi Aset Daerah;	
2	Meningkatnya Penerimaan Asli daerah	1. Peningkatan sarana dan prasarana layanan dan pendukung peningkatan pajak dan retribusi daerah; 2. Penyusunan dan analisis kebijakan pajak dan retribusi daerah; 3. Optimalisasi pendataan basis data dan pendaftaran pajak dan retribusi daerah; 4. Pengendalian pemeriksaan dan pengawasan pajak dan retribusi daerah; 5. Peningkatan layanan dan konsultasi pajak dan retribusi daerah; 6. Mengoptimalkan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan PBB, Pajak	1. Meningkatkan Efektifitas Pemungutan Retribusi Daerah dan Pengelolaan Aset Daerah; 2. Meningkatkan Investasi dan kemudahan dalam berusaha;	





No	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA BPKD	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Orang Pribadi Dalam Negeri (PPh OPDN), dan PPh Pasal 21; 7. Meningkatkan akurasi data Sumber Daya Alam sebagai dasar perhitungan pembagian dalam Dana Perimbangan. 8. Meningkatkan kualitas kinerja reformasi birokrasi pemerintah daerah dan kinerja keuangan daerah.		
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	1. Meningkatkan kapasitas dan kualitas sumber daya aparatur dan kelembagaan IPTEK; 2. Meningkatkan kualitas data, perencanaan dan pengawasan pembangunan daerah; 3. Meningkatkan kualitas dan daya saing pelayanan publik; 4. Meningkatkan pendapatan daerah, meningkatnya tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah dan meningkatnya efektivitas alokasi belanja daerah; 5. Meningkatkan kontribusi pembiayaan pembangunan daerah dari masyarakat dan swasta; 6. Meningkatkan pelayanan publik; 7. Meningkatkan kesadaran, kepatuhan dan supremasi hukum; 8. Meningkatkan kualitas kehidupan demokrasi masyarakat; 9. Menurunnya tingkat gangguan ketentraman dan ketertiban umum.	1. Memperkuat peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam pengawasan Keuangan Daerah; 2. Peningkatan Kapasitas SDM dalam pengelolaan Keuangan Daerah; 3. Optimalisasi Sistem Pengawasan dan Monitoring; 4. Penguatan evaluasi dan audit mandiri dari Inspektorat; 5. Peningkatan Kapasitas SDM dalam Pengelolaan Aset Daerah; 6. mengoptimalkan kualitas perencanaan, evaluasi dan pelaporan OPD; 7. Mengoptimalkan administrasi keuangan OPD 8. Mengoptimalkan administrasi, pengadaan, pemeliharaan Barang Milik Daerah OPD; 9. Mengoptimalkan administrasi Kepegawaian, administrasi umum, Jasa Penunjang OPD;	

Sumber : Matriks Renstra BPKD Kab. Pandeglang 2025-2029 dan RPJMD Kab. Pandeglang 2025-2029

Untuk mendukung sasaran yang ingin dicapai dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah, maka arah kebijakan yang dilakukan oleh BPKD Kab. Pandeglang adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kepatuhan terhadap Standar Akuntansi Pemerintah (SAP);
2. Memperkuat peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam pengawasan Keuangan Daerah;
3. Penguatan Sistem Akuntansi;
4. Meningkatkan Koordinasi antara BPKD dan SKPD;
5. Peningkatan Kapasitas SDM dalam pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Optimalisasi Sistem Pengawasan dan Monitoring;
7. Penguatan evaluasi dan audit mandiri dari Inspektorat;
8. penyusunan regulasi dilakukan secara komperhensif;





9. Penguatan regulasi dan kepatuhan terhadap jadwal penyusunan APBD;
10. Optimalisasi perencanaan dan sinkronisasi kebijakan antar SKPD;
11. Melakukan Penyelarasan antara kebijakan Pusat dan Daerah;
12. Penguatan Regulasi dan Standarisasi Inventarisasi BMD;
13. Digitalisasi dan Penguatan Sistem Informasi Aset Daerah;
14. Peningkatan Kapasitas SDM dalam Pengelolaan Aset Daerah;
15. Meningkatkan Efektifitas Pemungutan Retribusi Daerah dan Pengelolaan Aset Daerah;
16. Meningkatkan Investasi dan kemudahan dalam berusaha;
17. mengoptimalkan kualitas perencanaan, evaluasi dan pelaporan OPD;
18. Mengoptimalkan administrasi keuangan OPD;
19. Mengoptimalkan administrasi, pengadaan, pemeliharaan Barang Milik Daerah OPD;
20. Mengoptimalkan administrasi Kepegawaian, administrasi umum, Jasa Penunjang OPD;

### III.3 Program dan Kegiatan

Pada Tahun Anggaran 2025, Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pandeglang melaksanakan 3 (tiga) program, 12 (dua belas) kegiatan dan 57 (lima puluh tujuh) sub kegiatan, adapun rinciannya sebagai berikut:

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, ada 6 (enam) kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
- c. Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah;
- d. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
- e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;





- f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
- g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Program Pengelolaan Keuangan Daerah, ada 5 (Lima) kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah;
- b. Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah;
- c. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah;
- d. Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah.



# BAB IV

## RENCANA KERJA DAN PENDANAAN



Program adalah instrumen kebijakan berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh BPKD sebagai wujud implementasi strategi dan kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran, serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah. Selain itu juga program berarti kumpulan kegiatan yang sistemis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah maupun masyarakat tertentu untuk mencapai sasaran tertentu. Berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan maka program-program yang akan dilaksanakan oleh BPKD pada tahun 2025 sebanyak 4 (empat) program, yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah;
4. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah.

Kegiatan adalah perwujudan dari program BPKD sebagai bagian dari pencapaian program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya, baik berupa personil (SDM), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari sumber daya tersebut sebagai masukan (input).

untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. Pengertian 'bersifat indikatif' dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 adalah bahwa informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan sebagai masukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana (termasuk rumusan kegiatan), hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak kaku (fleksibel). Lebih lanjut bahwa program dan kegiatan yang ditetapkan BPKD tentunya mengacu pada regulasi Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Adapun





rincian Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah sebagaimana pada Tabel IV.1 di bawah ini.





Tabel IV.1  
Rencana Kerja dan Pendanaan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH							512.374.936.548,00							802.770.965.241,00	
5		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						512.374.936.548,00							802.770.965.241,00		
	5,02	KEUANGAN						512.374.936.548,00							802.770.965.241,00		
1,	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	33.868.972.911,00						-	182.084.733.421,00		
		[ Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ]	IKM Perangkat Daerah Jumlah Inovasi Perangkat Daerah yang berkelanjutan Nilai AKIP Perangkat Daerah	1 2 81	1 72.05	-1 75	-2 76	33.868.972.911,00	-	-	-	-	-	-	182.084.733.421,00	-	
	5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	46.700.000,00			-	Mendorong Kemajuan Ekonomi Secara Inklusif Melalui Penguatan Sektor Kreatif, Unggulan, dan Potensial Meningkatkan daya saing ekonomi melalui peningkatan ke mandirian fiskal, kemudahan investasi dan ekonomi be rkelanjutan, pemberday aan pemuda berbasis ekonomi kreatif, serta kemitraan UMKM pondok pesantren	-	-	67.700.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	





NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	5.02.01.2.01.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					7 Dokumen	00,00	9.300.0	Kab. Pandeglang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mendorong Kemajuan Ekonomi Secara Inklusif Melalui Penguatan Sektor Kreatif, Unggulan, dan Potensial Meningkatkan daya saing ekonomi melalui peningkatan ke mandirian fiskal, kemudahan investasi dan ekonomi berkelanjutan, pemberdayaan pemuda berbasis ekonomi kreatif, serta kemitraan UMKM pondok pesantren	-	12.300.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.01.002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					1 Dokumen	00,00	4.000.0	Kab. Pandeglang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mendorong Kemajuan Ekonomi Secara Inklusif Melalui Penguatan Sektor Kreatif, Unggulan, dan Potensial	-	7.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.01.003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD					1 Dokumen	00,00	4.000.0	Kab. Pandeglang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mendorong Kemajuan Ekonomi Secara Inklusif Melalui Penguatan Sektor Kreatif, Unggulan, dan Potensial Meningkatkan daya saing ekonomi melalui peningkatan ke mandirian fiskal, kemudahan investasi dan ekonomi be	00,00	7.000.0	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH





NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
											NASIONAL					DAERAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
												kelanjutan, pemberdayaan pemuda berbasis ekonomi kreatif, serta kemitraan UMKM pondok pesantren					
	5.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD															
			<i>Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD</i>				1 Dokumen	00,00	4.000.000	Kab. Pandeglang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mendorong Kemajuan Ekonomi Secara Inklusif Melalui Penguatan Sektor Kreatif, Unggulan, dan Potensial	-	00,00	7.000.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD															
			<i>Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD</i>				1 Dokumen	00,00	4.000.000	Kab. Pandeglang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mendorong Kemajuan Ekonomi Secara Inklusif Melalui Penguatan Sektor Kreatif, Unggulan, dan Potensial Meningkatkan daya saing ekonomi melalui peningkatan ke mandirian fiskal, kemudahan investasi dan ekonomi berkelanjutan, pemberdayaan pemuda berbasis ekonomi kreatif, serta kemitraan UMKM pondok pesantren	-	7.000.000,00	000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD															
			<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan</i>				6 Laporan	00,00	9.400.000	Kab. Pandeglang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mendorong Kemajuan Ekonomi Secara Inklusif Melalui Penguatan Sektor Kreatif,	-	12.400.000,00	000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH





NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1			Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						Semua Kel/Desa			Unggulan, dan Potensial				
	5.02.01.2.01.007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					24 Laporan	12.000.000,00	Kab. Pandeglang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mendorong Kemajuan Ekonomi Secara Inklusif Melalui Penguatan Sektor Kreatif, Unggulan, dan Potensial Meningkatkan daya saing ekonomi melalui peningkatan ke mandirian fiskal, kemudahan investasi dan ekonomi berkelanjutan, pemberdayaan pemuda berbasis ekonomi kreatif, serta kemitraan UMKM pondok pesantren			15.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						32.040.711.000,00			-	Mendorong Kemajuan Ekonomi Secara Inklusif Melalui Penguatan Sektor Kreatif, Unggulan, dan Potensial Meningkatkan daya saing ekonomi melalui peningkatan ke mandirian fiskal, kemudahan investasi dan ekonomi berkelanjutan, pemberdayaan pemuda berbasis ekonomi kreatif, serta kemitraan			58.927.795.510,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH





NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
												UMKM pondok pesantren				
	5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				66 ORANG	32.000.000.000,00	Kab. Pandeglang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mendorong Kemajuan Ekonomi Secara Inklusif Melalui Penguatan Sektor Kreatif, Unggulan, dan Potensial Meningkatkan daya saing ekonomi melalui peningkatan ke mandirian fiskal, kemudahan investasi dan ekonomi berkelanjutan, pemberdayaan pemuda berbasis ekonomi kreatif, serta kemitraan UMKM pondok pesantren	-		58.876.084.510,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD														
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				36 Dokumen	12.050.000,00	Kab. Pandeglang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mendorong Kemajuan Ekonomi Secara Inklusif Melalui Penguatan Sektor Kreatif, Unggulan, dan Potensial	-		15.050.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2 Laporan	00,00 6.161,00	Kab. Pandeglang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mendorong Kemajuan Ekonomi Secara Inklusif Melalui Penguatan Sektor Kreatif, Unggulan, dan Potensial Meningkatkan daya saing ekonomi melalui peningkatan ke mandirian fiskal,	-	00,00	9.161,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH





NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
											NASIONAL					DAERAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
												kemudahan investasi dan ekonomi berkelanjutan, pemberdayaan pemuda berbasis ekonomi kreatif, serta kemitraan UMKM pondok pesantren					
	5.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD															
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				17 Laporan	000,00	22.500.	Kab. Pandeglang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mendorong Kemajuan Ekonomi Secara Inklusif Melalui Penguatan Sektor Kreatif, Unggulan, dan Potensial Meningkatkan daya saing ekonomi melalui peningkatan ke mandirian fiskal, kemudahan investasi dan ekonomi berkelanjutan, pemberdayaan pemuda berbasis ekonomi kreatif, serta kemitraan UMKM pondok pesantren		000,00	27.500.	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						4.000.000,00					Mendorong Kemajuan Ekonomi Secara Inklusif Melalui Penguatan Sektor Kreatif, Unggulan, dan Potensial Meningkatkan daya saing ekonomi melalui peningkatan ke mandirian fiskal, kemudahan investasi dan ekonomi berkelanjutan, pemberdayaan pemuda berbasis ekonomi kreatif,		00,00	7.000.0	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH





NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
											NASIONAL					DAERAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
												serta kemitraan UMKM pondok pesantren					
	5.02.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD															
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				36 Laporan	00,00	4.000.0	Kab. Pandeglang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mendorong Kemajuan Ekonomi Secara Inklusif Melalui Penguatan Sektor Kreatif, Unggulan, dan Potensial Meningkatkan daya saing ekonomi melalui peningkatan ke mandirian fiskal, kemudahan investasi dan ekonomi berkelanjutan, pemberdayaan pemuda berbasis ekonomi kreatif, serta kemitraan UMKM pondok pesantren		00,00	7.000.0	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	00,00	650.396.0			-	Mendorong Kemajuan Ekonomi Secara Inklusif Melalui Penguatan Sektor Kreatif, Unggulan, dan Potensial Meningkatkan daya saing ekonomi melalui peningkatan ke mandirian fiskal, kemudahan investasi dan ekonomi berkelanjutan, pemberdayaan pemuda berbasis ekonomi kreatif, serta kemitraan UMKM pondok pesantren		00,00	741.396.0	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor															







NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1			Kantor yang Disediakan						ang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UMUM (DAU)						N KEUANGAN DAERAH
		[ Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ]	IKM Perangkat Daerah Jumlah Inovasi Perangkat Daerah yang berkelanjutan Nilai AKIP Perangkat Daerah	1 2 81	1 72.05	- 1 75	- 2 76	33.868.972.911,00	-	-	-	-	-	182.084.733.421,00	-	
5.02.01.2.06.0005		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	23.327.000,00	Kab. Pandeglang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-			28.327.000,00		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH





NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB			
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)				
											NASIONAL					DAERAH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
												UMKM pondok pesantren						
	5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				1 Laporan	00,00	188.150.0	Kab. Pandeglang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mendorong Kemajuan Ekonomi Secara Inklusif Melalui Penguatan Sektor Kreatif, Unggulan, dan Potensial Meningkatkan daya saing ekonomi melalui peningkatan ke mandirian fiskal, kemudahan investasi dan ekonomi berkelanjutan, pemberdayaan pemuda berbasis ekonomi kreatif, serta kemitraan UMKM pondok pesantren	-		00,00	199.150.0	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	000,00	75.000.			-	Mendorong Kemajuan Ekonomi Secara Inklusif Melalui Penguatan Sektor Kreatif, Unggulan, dan Potensial Meningkatkan daya saing ekonomi melalui peningkatan ke mandirian fiskal, kemudahan investasi dan ekonomi berkelanjutan, pemberdayaan pemuda berbasis ekonomi kreatif, serta kemitraan UMKM pondok pesantren	-	-	000,00	85.000.	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																





NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB			
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)				
											NASIONAL	DAERAH							
1			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	000,00	75.000.	Kab. Pandeglang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mendorong Kemajuan Ekonomi Secara Inklusif Melalui Penguatan Sektor Kreatif, Unggulan, dan Potensial Meningkatkan daya saing ekonomi melalui peningkatan ke mandirian fiskal, kemudahan investasi dan ekonomi berkelanjutan, pemberdayaan pemuda berbasis ekonomi kreatif, serta kemitraan UMKM pondok pesantren			000,00	85.000.	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	
	5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						11,00	715.965.9			-	Mendorong Kemajuan Ekonomi Secara Inklusif Melalui Penguatan Sektor Kreatif, Unggulan, dan Potensial Meningkatkan daya saing ekonomi melalui peningkatan ke mandirian fiskal, kemudahan investasi dan ekonomi berkelanjutan, pemberdayaan pemuda berbasis ekonomi kreatif, serta kemitraan UMKM pondok pesantren		11,00	121.869.641.9	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH		
	5.02.01.2.08.00.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik											-						
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya				12 Laporan	00,00	428.040.0	Kab. Pandeglang, Semua Kecamatan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mendorong Kemajuan Ekonomi Secara Inklusif Melalui Penguatan Sektor Kreatif,		00,00	448.040.0	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH		





NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
											NASIONAL					DAERAH	
1			Air dan Listrik yang Disediakan						an, Semua Kel/Desa								
	5.02.01.2.08.004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					12 Laporan	287.925.911,00	Kab. Pandeglang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mendorong Kemajuan Ekonomi Secara Inklusif Melalui Penguatan Sektor Kreatif, Unggulan, dan Potensial Meningkatkan daya saing ekonomi melalui peningkatan ke mandirian fiskal, kemudahan investasi dan ekonomi berkelanjutan, pemberdayaan pemuda berbasis ekonomi kreatif, serta kemitraan UMKM pondok pesantren	-		121.421.601.911,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	
	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						336.200.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Mendorong Kemajuan Ekonomi Secara Inklusif Melalui Penguatan Sektor Kreatif, Unggulan, dan Potensial Meningkatkan daya saing ekonomi melalui peningkatan ke mandirian fiskal,	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah		386.200.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	





NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
											NASIONAL					DAERAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
												kemudahan investasi dan ekonomi berkelanjutan, pemberdayaan pemuda berbasis ekonomi kreatif, serta kemitraan UMKM pondok pesantren					
	5.02.01.2.09.00.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan															
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				10 Unit	106.200.000,00	Kab. Pandeglang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Mendorong Kemajuan Ekonomi Secara Inklusif Melalui Penguatan Sektor Kreatif, Unggulan, dan Potensial Meningkatkan daya saing ekonomi melalui peningkatan ke mandirian fiskal, kemudahan investasi dan ekonomi berkelanjutan, pemberdayaan pemuda berbasis ekonomi kreatif, serta kemitraan UMKM pondok pesantren	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah		00,00	116.200.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.09.00.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya															
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	30.000.000,00	Kab. Pandeglang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Mendorong Kemajuan Ekonomi Secara Inklusif Melalui Penguatan Sektor Kreatif, Unggulan, dan Potensial Meningkatkan daya saing ekonomi melalui peningkatan ke mandirian fiskal, kemudahan investasi dan ekonomi berkelanjutan,	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	000,00	35.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	





NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
												pemberdayaan pemuda berbasis ekonomi kreatif, serta kemitraan UMKM pondok pesantren				
	5.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				1 Unit	200.000.000,00	Kab. Pandeglang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Mendorong Kemajuan Ekonomi Secara Inklusif Melalui Penguatan Sektor Kreatif, Unggulan, dan Potensial Meningkatkan daya saing ekonomi melalui peningkatan ke mandirian fiskal, kemudahan investasi dan ekonomi berkelanjutan, pemberdayaan pemuda berbasis ekonomi kreatif, serta kemitraan UMKM pondok pesantren	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah		235.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
2,	5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	<i>Persentase Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah</i>	-			100 %	477.420.248.637,00						-	619.484.516.820,00	
		[ Meningkatkan tata kelola anggaran, Perbendaharaan dan akuntansi dan pelaporan ]	<i>Persentase Pengelolaan keuangan daerah sesuai standar</i>	100	100	100	100	477.420.248.637,00	-	-	-	-	-	-	619.484.516.820,00	-
	5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	<i>Persentase RAPBD dan RAPBD-P tepat waktu</i>	-			100 %	1.556.281.484,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan	Mendorong Kemajuan Ekonomi Secara Inklusif Melalui Penguatan Sektor Kreatif, Unggulan, dan Potensial Meningkatkan daya saing	Persentase Jumlah Perda dan Perbup RAPBD dan RAPD-P Tepat waktu	-	1.674.179.067,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH





NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
											NASIONAL					DAERAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
											pekerjaan rantasan kemiskinan.	ekonomi melalui pen- ingkatan ke- mandirian fiskal, kemudahan investasi dan ekonomi be- rkelanjutan, pemberdayaan pemuda berbasis ekonomi kreatif, serta kemitraan UMKM pondok pesantren					
	5.02.02.2.01.00 01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS															
			Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun				2 Dokumen	66,00	130.690.8	Kab. Pandeg- lang, Semua Kecamat- an, Semua Kel/Desa	DANA ALOKAS- I UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertu- mbuhan ekonomi, p- emerataan ekonomi dan pembe- rantasan kemiskinan.	Mendorong Kemajuan Ekonomi Secara Inklusif Melalui Penguatan Sektor Kreatif, Unggulan, dan Potensial Meningkatkan daya saing ekonomi melalui pen- ingkatan ke- mandirian fiskal, kemudahan investasi dan ekonomi be- rkelanjutan, pemberdayaan pemuda berbasis ekonomi kreatif, serta kemitraan UMKM pondok pesantren	Persentase Jumlah Perda dan Perbup RAPBD dab RAPD-P Tepat waktu	00,00	140.690.0	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.01.00 02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS															
			Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun				2 Dokumen	58,00	133.057.2	Kab. Pandeg- lang, Semua Kecamat- an, Semua Kel/Desa	DANA ALOKAS- I UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertu- mbuhan ekonomi, p- emerataan ekonomi dan pembe- rantasan kemiskinan.	Mendorong Kemajuan Ekonomi Secara Inklusif Melalui Penguatan Sektor Kreatif, Unggulan, dan Potensial Meningkatkan daya saing ekonomi melalui pen- ingkatan ke- mandirian fiskal,	Persentase Jumlah Perda dan Perbup RAPBD dab RAPD-P Tepat waktu	58,00	143.057.2	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH





NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB			
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)				
											NASIONAL					DAERAH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
												kemudahan investasi dan ekonomi berkelanjutan, pemberdayaan pemuda berbasis ekonomi kreatif, serta kemitraan UMKM pondok pesantren						
	5.02.02.2.01.0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD																
			Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi				70 Dokumen	49,00	115.761.4	Kab. Pandeglang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Mendorong Kemajuan Ekonomi Secara Inklusif Melalui Penguatan Sektor Kreatif, Unggulan, dan Potensial Meningkatkan daya saing ekonomi melalui peningkatan ke mandirian fiskal, kemudahan investasi dan ekonomi berkelanjutan, pemberdayaan pemuda berbasis ekonomi kreatif, serta kemitraan UMKM pondok pesantren	Persentase Jumlah Perda dan Perbup RAPBD dan RAPD-P Tepat waktu		49,00	125.761.4	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.01.0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD																
			Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi				69 Dokumen	35,00	113.676.7	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pandeglang, Semua Kecamatan,	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Mendorong Kemajuan Ekonomi Secara Inklusif Melalui Penguatan Sektor Kreatif, Unggulan, dan Potensial Meningkatkan daya saing ekonomi melalui peningkatan ke mandirian fiskal, kemudahan investasi dan ekonomi berkelanjutan,	Persentase Jumlah Perda dan Perbup RAPBD dan RAPD-P Tepat waktu	35,00	123.676.7	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	





NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
											NASIONAL	DAERAH						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
									Semua Kel/Desa			pemberdayaan pemuda berbasis ekonomi kreatif, serta kemitraan UMKM pondok pesantren						
	5.02.02.2.01.0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD																
			Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi				64 Dokumen	551,00	72.101.	Kab. Pandeglang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemerantasan kemiskinan.	Mendorong Kemajuan Ekonomi Secara Inklusif Melalui Penguatan Sektor Kreatif, Unggulan, dan Potensial Meningkatkan daya saing ekonomi melalui peningkatan ke mandirian fiskal, kemudahan investasi dan ekonomi berkelanjutan, pemberdayaan pemuda berbasis ekonomi kreatif, serta kemitraan UMKM pondok pesantren	Persentase Jumlah Perda dan Perbup RAPBD dan RAPD-P Tepat waktu		551,00	82.101.	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.01.0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD																
			Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi				64 Dokumen	551,00	72.101.	Kab. Pandeglang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemerantasan kemiskinan.	Mendorong Kemajuan Ekonomi Secara Inklusif Melalui Penguatan Sektor Kreatif, Unggulan, dan Potensial Meningkatkan daya saing ekonomi melalui peningkatan ke mandirian fiskal, kemudahan investasi dan ekonomi berkelanjutan, pemberdayaan pemuda berbasis ekonomi kreatif,	Persentase Jumlah Perda dan Perbup RAPBD dan RAPD-P Tepat waktu			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH





NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB			
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)				
											NASIONAL					DAERAH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
												serta kemitraan UMKM pondok pesantren						
	5.02.02.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD																
			Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD				3 Dokumen	36,00	262.814.4	Kab. Pandeglang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemerantasan kemiskinan.	Mendorong Kemajuan Ekonomi Secara Inklusif Melalui Penguatan Sektor Kreatif, Unggulan, dan Potensial Meningkatkan daya saing ekonomi melalui peningkatan ke mandirian fiskal, kemudahan investasi dan ekonomi berkelanjutan, pemberdayaan pemuda berbasis ekonomi kreatif, serta kemitraan UMKM pondok pesantren	Persentase Jumlah Perda dan Perbup RAPBD dan RAPD-P Tepat waktu		36,00	292.814.4	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD																
			Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD				3 Dokumen	43,00	327.574.1	Kab. Pandeglang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemerantasan kemiskinan.	Mendorong Kemajuan Ekonomi Secara Inklusif Melalui Penguatan Sektor Kreatif, Unggulan, dan Potensial Meningkatkan daya saing ekonomi melalui peningkatan ke mandirian fiskal, kemudahan investasi dan ekonomi berkelanjutan, pemberdayaan pemuda berbasis ekonomi kreatif, serta kemitraan UMKM pondok pesantren	Persentase Jumlah Perda dan Perbup RAPBD dan RAPD-P Tepat waktu		43,00	377.574.1	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH





NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
											NASIONAL	DAERAH						
1	5.02.02.2.01.0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran																
			Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran				20 Dokumen	95,00	328.503.4	Kab. Pandeglang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemerantasan kemiskinan.	Mendorong Kemajuan Ekonomi Secara Inklusif Melalui Penguatan Sektor Kreatif, Unggulan, dan Potensial Meningkatkan daya saing ekonomi melalui peningkatan ke mandirian fiskal, kemudahan investasi dan ekonomi berkelanjutan, pemberdayaan pemuda berbasis ekonomi kreatif, serta kemitraan UMKM pondok pesantren	Persentase Jumlah Perda dan Perbup RAPBD dan RAPD-P Tepat waktu		95,00	388.503.4	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	-	-			-	15,00	385.787.8			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemerantasan kemiskinan.	Mendorong Kemajuan Ekonomi Secara Inklusif Melalui Penguatan Sektor Kreatif, Unggulan, dan Potensial Meningkatkan daya saing ekonomi melalui peningkatan ke mandirian fiskal, kemudahan investasi dan ekonomi berkelanjutan, pemberdayaan pemuda berbasis ekonomi kreatif, serta kemitraan UMKM pondok pesantren	Persentase Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah sesuai standar	-	15,00	525.787.8	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.02.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah																
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan				12 Dokumen	30.263.070,00		Kab. Pandeglang,	DANA ALOKASI	Membangun dari desa dan dari bawah	Mendorong Kemajuan Ekonomi Secara Inklusif	Persentase Koordinasi dan		60.263.070,00		BADAN PENGELOLAAN





NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1			<i>Pengelolaan Kas Daerah</i>						Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UMUM (DAU)	untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemerantasan kemiskinan.	Melalui Penguatan Sektor Kreatif, Unggulan, dan Potensial Meningkatkan daya saing ekonomi melalui peningkatan ke mandirian fiskal, kemudahan investasi dan ekonomi berkelanjutan, pemberdayaan pemuda berbasis ekonomi kreatif, serta kemitraan UMKM pondok pesantren	Pengelolaan Perbendaharaan Daerah sesuai standar			N KEUANGAN DAERAH
								477.420.248.637,00						619.484.516.820,00		
5.02.02.2.02.0003		Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD</i>				10 Dokumen	34.348.341,00	Kab. Pandeglang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemerantasan kemiskinan.	Mendorong Kemajuan Ekonomi Secara Inklusif Melalui Penguatan Sektor Kreatif, Unggulan, dan Potensial Meningkatkan daya saing ekonomi melalui peningkatan ke mandirian fiskal, kemudahan investasi dan ekonomi berkelanjutan, pemberdayaan pemuda berbasis ekonomi kreatif, serta kemitraan UMKM pondok pesantren	Persentase Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah sesuai standar		64.348.341,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
		[ Meningkatnya tata kelola anggaran, Perbendaharaan dan akuntansi dan pelaporan ]	Persentase Pengelolaan keuangan daerah sesuai standar	100	100	100	100	477.420.248.637,00						619.484.516.820,00		
5.02.02.2.02.0005		Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya														





NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya				11 Dokumen	129.754.113,00	Kab. Pandeglang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemerantasan kemiskinan.	Mendorong Kemajuan Ekonomi Secara Inklusif Melalui Penguatan Sektor Kreatif, Unggulan, dan Potensial	Persentase Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah sesuai standar		159.754.113,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
5.02.02.2.02.009		Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pematangan atas SP2D dengan Instansi Terkait														
			Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pematangan atas SP2D dengan Instansi Terkait				11 Dokumen	129.754.13,00	Kab. Pandeglang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemerantasan kemiskinan.	Mendorong Kemajuan Ekonomi Secara Inklusif Melalui Penguatan Sektor Kreatif, Unggulan, dan Potensial Meningkatkan daya saing ekonomi melalui peningkatan ke mandirian fiskal, kemudahan investasi dan ekonomi berkelanjutan, pemberdayaan pemuda berbasis ekonomi kreatif, serta kemitraan UMKM pondok pesantren	Persentase Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah sesuai standar	13,00	149.754.1	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
5.02.02.2.02.0010		Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan														
			Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran				5 Dokumen	61.668.	Kab. Pandeglang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan	Mendorong Kemajuan Ekonomi Secara Inklusif Melalui Penguatan Sektor Kreatif, Unggulan, dan Potensial Meningkatkan daya saing	Persentase Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah sesuai standar	178,00	91.668.	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH





NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan</i>								pekerjaan rantasan kemiskinan.	ekonomi melalui peningkatan ke mandirian fiskal, kemudahan investasi dan ekonomi berkelanjutan, pemberdayaan pemuda berbasis ekonomi kreatif, serta kemitraan UMKM pondok pesantren				
	5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah						694.106.0				Mendorong Kemajuan Ekonomi Secara Inklusif Melalui Penguatan Sektor Kreatif, Unggulan, dan Potensial Meningkatkan daya saing ekonomi melalui peningkatan ke mandirian fiskal, kemudahan investasi dan ekonomi berkelanjutan, pemberdayaan pemuda berbasis ekonomi kreatif, serta kemitraan UMKM pondok pesantren			814.106.0	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.03.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah														
			<i>Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi</i>				64 Laporan	455.799.344,00	Kab. Pandeglang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		Mendorong Kemajuan Ekonomi Secara Inklusif Melalui Penguatan Sektor Kreatif, Unggulan, dan Potensial Meningkatkan daya saing ekonomi melalui peningkatan ke mandirian fiskal, kemudahan investasi dan ekonomi berkelanjutan,			495.799.344,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH





NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
								477.420.248.637,00				pemberdayaan pemuda berbasis ekonomi kreatif, serta kemitraan UMKM pondok pesantren			619.484.516.820,00	
5.02.02.2.03.0005		Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota														
			Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota				2 Dokumen	190.568.675,00	Kab. Pandeglang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		Mendorong Kemajuan Ekonomi Secara Inklusif Melalui Penguatan Sektor Kreatif, Unggulan, dan Potensial Meningkatkan daya saing ekonomi melalui peningkatan ke mandirian fiskal, kemudahan investasi dan ekonomi berkelanjutan, pemberdayaan pemuda berbasis ekonomi kreatif, serta kemitraan UMKM pondok pesantren			240.568.675,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
		[ Meningkatnya tata kelola anggaran, Perbendaharaan dan akuntansi dan pelaporan ]	Persentase Pengelolaan keuangan daerah sesuai standar	100	100	100	100	477.420.248.637,00							619.484.516.820,00	
5.02.02.2.03.0007		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah				4 Dokumen	019,00 47.738.	Kab. Pandeglang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		Mendorong Kemajuan Ekonomi Secara Inklusif Melalui Penguatan Sektor Kreatif, Unggulan, dan Potensial Meningkatkan daya saing ekonomi melalui peningkatan ke mandirian fiskal,			019,00 77.738.	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH





NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
												kemudahan investasi dan ekonomi berkelanjutan, pemberdayaan pemuda berbasis ekonomi kreatif, serta kemitraan UMKM pondok pesantren				
	5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah						474.734.073.300,00				Mendorong Kemajuan Ekonomi Secara Inklusif Melalui Penguatan Sektor Kreatif, Unggulan, dan Potensial Meningkatkan daya saing ekonomi melalui peningkatan ke mandirian fiskal, kemudahan investasi dan ekonomi berkelanjutan, pemberdayaan pemuda berbasis ekonomi kreatif, serta kemitraan UMKM pondok pesantren			616.405.443.900,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.04.0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan														
			Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan				12 Laporan	460.000.000.000,00	Kab. Pandeglang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER		Mendorong Kemajuan Ekonomi Secara Inklusif Melalui Penguatan Sektor Kreatif, Unggulan, dan Potensial Meningkatkan daya saing ekonomi melalui peningkatan ke mandirian fiskal, kemudahan investasi dan ekonomi berkelanjutan, pemberdayaan pemuda berbasis ekonomi kreatif,			470.000.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH





NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
												serta kemitraan UMKM pondok pesantren				
5.02.02.2.04.0009		Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak														
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak				12 Laporan	4.000.000.000,00	Kab. Pandeglang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	Mendorong Kemajuan Ekonomi Secara Inklusif Melalui Penguatan Sektor Kreatif, Unggulan, dan Potensial Meningkatkan daya saing ekonomi melalui peningkatan ke mandirian fiskal, kemudahan investasi dan ekonomi berkelanjutan, pemberdayaan pemuda berbasis ekonomi kreatif, serta kemitraan UMKM pondok pesantren			4.500.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
5.02.02.2.04.0010		Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota														
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota				12 Laporan	10.734.073.300,00	Kab. Pandeglang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	Mendorong Kemajuan Ekonomi Secara Inklusif Melalui Penguatan Sektor Kreatif, Unggulan, dan Potensial Meningkatkan daya saing ekonomi melalui peningkatan ke mandirian fiskal, kemudahan investasi dan ekonomi berkelanjutan, pemberdayaan pemuda berbasis ekonomi kreatif, serta kemitraan UMKM pondok pesantren			141.905.443.900,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH





NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	5.02.02.2.05	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	-	-	-	-	-	50.000.000,00	-	-	-	-	-	65.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	
	5.02.02.2.05.0002	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah				1 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Pandeglang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mendorong Kemajuan Ekonomi Secara Inklusif Melalui Penguatan Sektor Kreatif, Unggulan, dan Potensial Meningkatkan daya saing ekonomi melalui peningkatan ke mandirian fiskal, kemudahan investasi dan ekonomi be rkelanjutan, pemberday aan pemuda berbasis ekonomi kreatif, serta kemitraan UMKM pondok pesantren	-		65.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
3,	5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	-	-	-	-	-	1.085.715.000,00						-	1.201.715.000,00	





NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		[ Meningkatkan tata kelola aset daerah ]	Persentase Pengelolaan BMD sesuai standar	90	86,70	87	87,50	1.085.715.000,00	-	-	-	-	-	-	1.201.715.000,00	-	
	5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	-	-	-	-	-	1.085.715.000,00	-	-	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Mendorong Kemajuan Ekonomi Secara Inklusif Melalui Penguatan Sektor Kreatif, Unggulan, dan Potensial Meningkatkan daya saing ekonomi melalui peningkatan ke mandirian fiskal, kemudahan investasi dan ekonomi berkelanjutan, pemberdayaan pemuda berbasis ekonomi kreatif, serta kemitraan UMKM pondok pesantren	Persentase Pengelolaan BMD sesuai Standar	-	00,00	1.201.715.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.03.2.01.0001	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	-	-	-	1 Dokumen	75.000.000,00	Kab. Pandeglang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Mendorong Kemajuan Ekonomi Secara Inklusif Melalui Penguatan Sektor Kreatif, Unggulan, dan Potensial Meningkatkan daya saing ekonomi melalui peningkatan ke mandirian fiskal, kemudahan investasi dan ekonomi berkelanjutan, pemberdayaan pemuda berbasis ekonomi kreatif, serta kemitraan UMKM pondok pesantren	Persentase Pengelolaan BMD sesuai Standar	-	85.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	
								1.085.715.000,00							1.201.715.000,00		





NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	5.02.03.2.01.00	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah					1 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Pandeglang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemerantasan kemiskinan.	Mendorong Kemajuan Ekonomi Secara Inklusif Melalui Penguatan Sektor Kreatif, Unggulan, dan Potensial Meningkatkan daya saing ekonomi melalui peningkatan ke mandirian fiskal, kemudahan investasi dan ekonomi berkelanjutan, pemberdayaan pemuda berbasis ekonomi kreatif, serta kemitraan UMKM pondok pesantren	Persentase Pengelolaan BMD sesuai Standar		8.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
		[ Meningkatnya tata kelola aset daerah ]	Persentase Pengelolaan BMD sesuai standar	90	86,70	87	87,50	1.085.715.000,00	-	-	-	-	-	1.201.715.000,00	-	
	5.02.03.2.01.00	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah					10 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Pandeglang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemerantasan kemiskinan.	Mendorong Kemajuan Ekonomi Secara Inklusif Melalui Penguatan Sektor Kreatif, Unggulan, dan Potensial Meningkatkan daya saing ekonomi melalui peningkatan ke mandirian fiskal, kemudahan investasi dan ekonomi berkelanjutan, pemberdayaan pemuda berbasis ekonomi kreatif, serta kemitraan	Persentase Pengelolaan BMD sesuai Standar		8.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH





NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
												UMKM pondok pesantren				
	5.02.03.2.01.0004	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah														
			Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah				1 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Pandeglang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemerantasan kemiskinan.	Mendorong Kemajuan Ekonomi Secara Inklusif Melalui Penguatan Sektor Kreatif, Unggulan, dan Potensial	Persentase Pengelolaan BMD sesuai Standar		8.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
		-	-	-	-	-	-	1.085.715.000,00	-	-	-	-	-	-	1.201.715.000,00	-
	5.02.03.2.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah				816 Laporan	12.040.000,00	Kab. Pandeglang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemerantasan kemiskinan.	Mendorong Kemajuan Ekonomi Secara Inklusif Melalui Penguatan Sektor Kreatif, Unggulan, dan Potensial Meningkatkan daya saing ekonomi melalui peningkatan ke mandirian fiskal, kemudahan investasi dan ekonomi berkelanjutan, pemberdayaan pemuda berbasis ekonomi kreatif, serta kemitraan UMKM pondok pesantren	Persentase Pengelolaan BMD sesuai Standar		18.040.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
		[ Meningkatkan tata kelola aset daerah ]	Persentase Pengelolaan BMD sesuai standar	90	86,70	87	87,50	1.085.715.000,00	-	-	-	-	-	-	1.201.715.000,00	-
	5.02.03.2.01.0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi				64 Laporan	241.750.000,00	Kab. Pandeglang,	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah	Mendorong Kemajuan Ekonomi Secara Inklusif	Persentase Pengelolaan		271.750.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH





NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1			(LHI) Barang Milik Daerah						Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UMUM (DAU)	untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemerantasan kemiskinan.	Melalui Penguatan Sektor Kreatif, Unggulan, dan Potensial	BMD sesuai Standar			N KEUANGAN DAERAH
	5.02.03.2.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah					370 Laporan	490.725.000,00	Kab. Pandeglang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemerantasan kemiskinan.	Mendorong Kemajuan Ekonomi Secara Inklusif Melalui Penguatan Sektor Kreatif, Unggulan, dan Potensial	Persentase Pengelolaan BMD sesuai Standar		510.725.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.03.2.01.0008	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah				15 Laporan	69.600.000,00	Kab. Pandeglang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemerantasan kemiskinan.	Mendorong Kemajuan Ekonomi Secara Inklusif Melalui Penguatan Sektor Kreatif, Unggulan, dan Potensial Meningkatkan daya saing ekonomi melalui peningkatan ke mandirian fiskal, kemudahan investasi dan ekonomi berkelanjutan, pemberdayaan pemuda berbasis ekonomi kreatif, serta kemitraan UMKM pondok pesantren	Persentase Pengelolaan BMD sesuai Standar		79.600.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
								1.085.715.000,00								
	5.02.03.2.01.0009	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah													1.201.715.000,00	





NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah				2 Laporan	5.000.000,00	Kab. Pandeglang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemerantasan kemiskinan.	Mendorong Kemajuan Ekonomi Secara Inklusif Melalui Penguatan Sektor Kreatif, Unggulan, dan Potensial Meningkatkan daya saing ekonomi melalui peningkatan ke mandirian fiskal, kemudahan investasi dan ekonomi berkelanjutan, pemberdayaan pemuda berbasis ekonomi kreatif, serta kemitraan UMKM pondok pesantren	Persentase Pengelolaan BMD sesuai Standar		8.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
		[ Meningkatkan tata kelola aset daerah ]	Persentase Pengelolaan BMD sesuai standar	90	86,70	87	87,50	1.085.715.000,00							1.201.715.000,00	
	5.02.03.2.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah				21 Dokumen	73.800.000,00	Kab. Pandeglang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemerantasan kemiskinan.	Mendorong Kemajuan Ekonomi Secara Inklusif Melalui Penguatan Sektor Kreatif, Unggulan, dan Potensial Meningkatkan daya saing ekonomi melalui peningkatan ke mandirian fiskal, kemudahan investasi dan ekonomi berkelanjutan, pemberdayaan pemuda berbasis ekonomi kreatif, serta kemitraan UMKM pondok pesantren	Persentase Pengelolaan BMD sesuai Standar		83.800.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH





NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	5.02.03.2.01.0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah					64 Laporan	32.200.000,00	Kab. Pandeglang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemerantasan kemiskinan.	Mendorong Kemajuan Ekonomi Secara Inklusif Melalui Penguatan Sektor Kreatif, Unggulan, dan Potensial Meningkatkan daya saing ekonomi melalui peningkatan ke mandirian fiskal, kemudahan investasi dan ekonomi berkelanjutan, pemberdayaan pemuda berbasis ekonomi kreatif, serta kemitraan UMKM pondok pesantren	Persentase Pengelolaan BMD sesuai Standar		37.200.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.03.2.01.0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah					2 Laporan	60.600.000,00	Kab. Pandeglang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemerantasan kemiskinan.	Mendorong Kemajuan Ekonomi Secara Inklusif Melalui Penguatan Sektor Kreatif, Unggulan, dan Potensial Meningkatkan daya saing ekonomi melalui peningkatan ke mandirian fiskal, kemudahan investasi dan ekonomi berkelanjutan, pemberdayaan pemuda berbasis ekonomi kreatif, serta kemitraan UMKM pondok pesantren	Persentase Pengelolaan BMD sesuai Standar		70.600.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.03.2.01.0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota														





NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota				1 Orang	10.000.000,00	Kab. Pandeglang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemerantasan kemiskinan.	Mendorong Kemajuan Ekonomi Secara Inklusif Melalui Penguatan Sektor Kreatif, Unggulan, dan Potensial Meningkatkan daya saing ekonomi melalui peningkatan ke mandirian fiskal, kemudahan investasi dan ekonomi berkelanjutan, pemberdayaan pemuda berbasis ekonomi kreatif, serta kemitraan UMKM pondok pesantren	Persentase Pengelolaan BMD sesuai Standar		13.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
<b>J U M L A H</b>								<b>512.374.936.548,00</b>						<b>802.770.965.241,00</b>		





# BAB IV

## PENUTUP





Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Pandeglang Tahun 2026 memuat penyesuaian tujuan, sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan, beserta target kinerja dan pagu indikatif yang diselaraskan dengan dinamika pelaksanaan pembangunan serta evaluasi kinerja sampai Triwulan III tahun 2025. Dokumen ini menjadi pedoman operasional BPKD Kabupaten Pandeglang dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah selama Tahun Anggaran 2026. Dalam penyusunannya, terdapat beberapa hal penting yang menjadi perhatian, antara lain:

1. Perumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikator kinerja diarahkan untuk mendukung pencapaian visi, misi, dan prioritas pembangunan Pemerintah Kabupaten Pandeglang;
2. Renja 2026 ini disusun berpedoman pada Renstra BPKD Kabupaten Pandeglang Tahun 2025–2029, sehingga seluruh penyesuaian tetap berada dalam koridor arah kebijakan jangka menengah perangkat daerah;
3. Penyesuaian Renja dilakukan dengan mengacu pada RKPD Kabupaten Pandeglang Tahun 2026, sebagai upaya menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan dan penganggaran;
4. Renja 2026 ini menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perubahan, yang selanjutnya akan ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) BPKD Kabupaten Pandeglang Tahun 2026;
5. Dalam proses penyusunan RKA dan DPA, dimungkinkan terjadinya penyempurnaan atau revisi berdasarkan hasil revidi Inspektorat maupun pembahasan bersama DPRD serta evaluasi Pemerintah Provinsi;
6. Setiap bentuk pergeseran kegiatan atau pagu anggaran yang terjadi akan dituangkan secara resmi dalam Dokumen Renja BPKD Kabupaten Pandeglang Tahun 2026.

Pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan dalam Renja Perubahan ini akan dilaksanakan secara sinergis, terukur, dan berkesinambungan. Keberhasilan implementasinya tidak terlepas dari komitmen seluruh aparatur Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pandeglang, serta dukungan dan partisipasi aktif masyarakat dan pemangku kepentingan pembangunan di Kabupaten Pandeglang.

Dengan ditetapkannya Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2026 ini, diharapkan terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan pembangunan.



Dokumen ini menjadi acuan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPKD sekaligus sebagai instrumen pengukuran kinerja dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah secara efektif, akuntabel, dan berkelanjutan.

Pandeglang, November 2025  
**KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN**  
**DAERAH**  
**KABUPATEN PANDEGLANG**

  
**YAHYA GUNAWAN KASBIN. S.Sos**

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19671127 198801 1 001

